

Sabian Utsman  
Nurpahsari

# **BIAYA KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN ANAK PASCA PERCERAIAN**



Penerbit K-Media  
Yogyakarta, 2020

---

**BIAYA KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN ANAK PASCA PERCERAIAN**

xii + 117 hlm.; 15,5 x 23 cm

---

**ISBN: 978-xxx**

**Penulis** : Sabian Utsman & Nurpahsari

**Tata Letak** : Nur Huda A.

**Desain Sampul** : Nur Huda A.

**Cetakan** : April 2020

Copyright © 2020 by Penerbit K-Media  
All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

**Isi di luar tanggung jawab percetakan**

Penerbit K-Media  
Anggota IKAPI No.106/DIY/2018  
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.  
e-mail: kmedia.cv@gmail.com

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Penulisan .....	9
C. Kegunaan Penulisan .....	9
D. Waktu dan Tempat Penelitian .....	10
E. Penelitian Terdahulu.....	10
<b>BAB II      KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Kerangka Teori.....	17
1. Teori Pendidikan Anak .....	17
2. Teori Tanggung Jawab .....	22
3. Teori <i>Welfare State</i> .....	27
4. Teori <i>Maslahah al-Mursalah</i> .....	30
5. Teori <i>Maqasid Syariah</i> .....	31
B. Konseptual Penulisan .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian .....	35
1. Jenis Penelitian.....	35
2. Pendekatan Penelitian .....	35

B. Objek dan Subjek Penelitian .....	36
1. Subjek (Data Primer) .....	36
2. Objek (Data Sekunder) .....	36
C. Metode Pengumpulan Data .....	37
D. Metode Pengolahan Dan Analisis Data.....	38
E. Sistematika Penulisan.....	38

<b>BAB IV</b>	<b>POBLEMATIKA PELAKSANAAN BIAYA KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN ANAK PASCAPERCERAIAN YANG TERRJADI DIMASYARAKAT .....</b>	<b>41</b>
A. Kewajiban Orang Tua Dalam Mengasuh Anak .....		41
B. Naturalisasi Hak Anak Dalam Memperoleh Pendidikan.....		53
1. Prinsip Non Diskriminasi .....		57
2. Prinsip yang terbaik bagi anak ( <i>best interest of the child</i> ).....		58
3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan ( <i>the rights to life, survival and development</i> ) .....		58
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak ( <i>respect for the views of the child</i> ).....		58
C. Dampak Perceraian Oran Tua yang Dirasakan Anak .....		65
D. Pelaksanaan Biaya Pendidikan Anak Pascaperceraian Orang Tua di Masyarakat .....		68

<b>BAB V</b>	<b>IDENTIFIKASI PENYEBAB KELALAIAN ORANG TUA DALAM PELAKSANAAN BIAYA KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN ANAK PASCAPERCERAIAN YANG TERJADI DI MASYARAKAT .....</b>	<b>73</b>
A.	Legalitas Hukum Pelaksanaan Biaya Kesejahteraan Pendidikan Anak Pascaperceraian Orang Tua.....	73
B.	Identifikasi Kelalaian Pelaksanaan Kesejahteraan Pendidikan Anak Pascaperceraian Orang Tua yang terjadi di Masyarakat .....	88
<b>BAB VI</b>	<b>PELAKSANAAN BIAYA KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN ANAK PASCAPERCERAIAN ORANG TUA IMPLEMENTASI KAJIAN UNDANG- UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1979 DAN HUKUM ISLAM .....</b>	<b>93</b>
A.	Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1979.....	93
B.	Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	97
<b>BAB VII</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>105</b>
A.	Kesimpulan.....	105
B.	Saran .....	108
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>109</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian .....	11
--	----

## DAFTAR SINGKATAN

ed.	: Editor jika satu orang
eds.	: Editor jika ada dua orang
hal.	: Halaman
terj.	: Terjemah
t.th.	: Tanpa tahun
t.tp.	: Tanpa tempat
UU	: Undang-Undang
No.	: Nomor
PP	: Peraturan Pemerintah
pnj.	: Penerjemah
Q.S.	: Qur'an Surah
SAW.	: Salallahu'alaihiwasalam
SWT.	: Subhanahuwata'ala
RA.	: Radiallahu 'anhu
SDA	: Sumber daya Alam
SDM	: Sumber daya manusia
KHI	: Kompilasi Hukum Islam



## PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
م	Mim	L	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	Em
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

### D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	ditulis	A
اِ	Kasrah	ditulis	I
اُ	Dammah	ditulis	U

### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā’</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

# I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejatinya pernikahan merupakan pengikat dua insan dalam komitmen dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>1</sup> Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang rumusannya yakni, “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

Dalam perjalanan rumah tangga, hal yang tidak dapat dihindari ialah adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri. hal ini terjadi karena sifat, karakter, pikiran dan kebiasaan dua manusia yang terikat dalam pertalian pernikahan memiliki sisi yang tidak semuanya sama. Dalam mengatasi masalah rumah tangga inilah diperlukan sikap yang mengedepankan kebaikan bersama dengan saling intropeksi diri masing-masing bukan egoisme individu.

Permasalahan rumah tangga ini dapat diselesaikan bersama dengan saling mengalah, saling mengisi kekurangan, dan senantiasa selalu berkomunikasi intensif dengan pasangan. Sehingga permasalahan rumah tangga dapat teratasi dengan damai. Peran keluarga terutama orang tua suami istri tersebut sebagai penasehat rumah tangga. Apabila upaya damai telah ditempuh suami istri, namun tidak juga menemui titik damai, maka langkah terakhir adalah perceraian yang secara legal dilakukan di

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam, *Bab Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 77 bagian No.1*, Bandung, Fokusind Mandiri, 2013, hal.33.

<sup>2</sup> Prof. Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, PT.Rajagrafindo Persada, 2004, hal. 46.

Pengadilan Agama, bagi masyarakat beragama Islam dan Pengadilan Negeri, bagi masyarakat yang beragama nonmuslim.

Rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi ada beragam alasan, namun bagaimanapun perceraian dalam rumah tangga yang berhukum halal dalam agama (terutama agama Islam), mendudukan masalah perceraian sebagai pekara yang dibenci oleh Allah SWT.<sup>3</sup>

Perceraian mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan jiwa dan pendidikan anak, terutama anak usia Sekolah Dasar dan remaja. Diantaranya dapat menyebabkan anak bersikap pendiam dan rendah diri, nakal yang berlebihan, prestasi belajar rendah dan merasa kehilangan. Walaupun tidak pada semua kasus demikian tapi sebagian besar menimbulkan dampak yang negatif terhadap perkembangan jiwa anak dan juga berpengaruh terhadap proses pendidikan anak. Selain itu pemberi nafkah secara utuh kepada anak menjadi permasalahan utama dalam melanjutkan pendidikan, seringkali dengan faktor ekonomi yang tidak mencukupi dari orang tua tunggal memaksa anak untuk putus sekolah dan beralih membantu pekerjaan orang tua.

Menurut Antara News.com yang di unggah pada tanggal 27 Juni 2011, perceraian orang tua menyebabkan anak terlantar. B.Metiama dalam seminar, “Pencegahan Anak Putus Sekolah dan Penghapusan Pekerja” Anak, menyatakan bahwa anak terlantar bukan hanya anak-anak jalanan namun juga anak sekolah, mereka adalah korban dari perceraian orang tua.<sup>4</sup>

Pada usia yang belia, anak pasca perceraian orang tua diharapkan tetap memperoleh kesejahteraannya dengan mendapatkan pembiayaan kesejahteraan baik dari ayah ataupun ibu kandung. Senyatanya ketidakutuhan rumah tangga menjadi masalah tersendiri bagi anak, yakni ketidakutuhan kasih sayang orang tua (psikologis) dan jaminan kesejahteraannya. Padahal anak merupakan aset negara yang dalam

---

<sup>3</sup> Himatu Rodiah, *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam*, Tangerang, PT.Cahaya Insan Suci, 2015, hal. 7.

<sup>4</sup> Editor Ade P.Marboen yang di unduh di <https://www.antaranews.com/berita/264927/perceraian-orangtua-bikin-anak-terlantar>, 30 Oktober 2018.

berbagai aspek kehidupan mempunyai peran yang besar. Sebagai kekuatan suatu negara, anak-anak perlu mendapat perlindungan hukum demi menjamin hak-hak mereka.

Upaya penjejahteraan kehidupan anak merupakan investasi utama dalam mendukung cita-cita bangsa. KEPADANYALAH digantungkan segala harapan bangsa di masa yang akan datang. Karena itu, perhatian yang besar sudah sepantasnya diberikan dalam rangka menyongsong hari esok yang lebih baik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017, Anak wajib dilindungi karena mereka punya hak hidup. Pemenuhan hak anak adalah dari sisi pengasuhan.<sup>5</sup>

Fokus peneliti berhubungan dengan pelaksanaan biaya kesejahteraan pendidikan anak pascaperceraian orang tua. Berdasarkan pengamatan peneliti dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 mengenai kesejahteraan anak mengenai jaminan kesejahteraan anak pasca perceraian orang tua, perlu adanya timbal balik yang nyata bersesuaian dengan gerak hukum responsif mengenai aturan dalam pembiayaan kesejahteraan anak pasca perceraian orang tuanya hingga berusia mandiri (21 tahun) terutama mengenai biaya pendidikan dengan moralitas orang tua pasca bercerai. Dengan adanya peraturan yang responsif dan pondasi moralitas orang tua mengenai pentingnya pendidikan anak pasca perceraian (tidak boleh terlantar ataupun terabaikan) inilah yang nantinya akan menjadi pedoman atau panduan para orang tua pasca perceraian untuk tetap menjamin pendidikan anaknya yang diberikan secara konsisten dan pasti.

Ketentuan ini berlaku untuk ayah dan ibu kandung anak tersebut sesuai dengan penghasilan dan kerelaan yang patut untuk anak, terutama untuk orang tua yang memiliki penghasilan ekonomi menengah ke atas, yakni penghasilan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ke atas (jika dihitung penghasilan per tahun mencapai Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Perhitungan ini berdasarkan nisab emas yakni sebanyak 85 (delapan puluh lima) gram atau setara dengan Rp. 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah)

---

<sup>5</sup> Di unduh di <http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175334/PP%20Nomor%2044%20Tahun%202017.pdf>, UU No.44 tahun 2017, tanggal 08 Febusri 2018.

berdasarkan perhitungan harga emas Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya.

Dengan diberikannya kepastian dalam pemberian biaya kesejahteraan pendidikan anak untuk orang tua yang minimal memiliki kemampuan ekonomi menengah keatas yakni Rp.5.000.0000 (lima juta rupiah) diharapkan tidak ada lagi fenomena putus sekolah dengan alasan berorang tua tunggal atau dalam asuhan orang tua baru (ayah atau ibu tiri) karena ayah atau ibu kandungnya telah menikah lagi (memiliki keluarga baru).

Proses pengasuhan anak dan pendidikannya akan dapat berjalan dengan baik, jika kedua orang tua saling membantu. Tentu saja ini dapat dilakukan dengan baik jika tersebut benar-benar keluarga mengedepankan yang *ma'ruf* beaskan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Senyatanya ketika orang tua terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak.<sup>6</sup>

Hukum Islam telah memberikan tugas kewajiban mengasuh dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu bersifat membantu. Ibu hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya. Sesungguhnya dalam hukum Islam sifat hubungan hukum antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi materialnya, yaitu menyusukan (*irdha'*), memberi nafkah, dan mengasuh (*hadlanah*), dan dari segi immaterial yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain.<sup>7</sup>

Aturan yang berkenaan dengan pembiayaan kesejahteraan baik masih proses ataupun pasca perceraian dikedepankan sikap *ma'ruf* baik untuk mantan pasangan dan anak-anak yang diperoleh dalam pernikahan tersebut, hal ini telah diperintahkan Allah SWT., dalam QS. Al Baqarah [2]:231 yakni sebagai berikut

---

<sup>6</sup> Aminur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1 /1974 sampai KHI...*, hal. 294.

<sup>7</sup> Hilman Hadikusma, *Hukum Perkawinan Indonesia (menurut: perundangan hukum adat hukum Islam)*, Mandar Maju: Bandung, 2003, hal.144.



وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغَنِّ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا  
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ  
الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya:”Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat lalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab (Al Qur’an) dan Al Hikmah (As Sunah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al Baqarah[2]:231)<sup>8</sup>

Dalam ayat di atas dapat kita petik peringatan mengenai berlaku baik terhadap mantan pasangan maupun anak yang terlahir dalam pernikahan. Dengan berlaku *ma’ruf* (baik) tersebut maka harmonisasi tetap bisa terjalin.

*Ma’ruf* merupakan suatu hal yang umum dikenal, artinya perkara tersebut sudah lumrah dalam masyarakat, jika mereka lihat, maka mereka tidak akan mengingkari (kebaikannya).<sup>9</sup> Tanggung jawab terhadap pengasuhan anak adalah tanggung jawab semua pihak (pemerintah, masyarakat, dan keluarga). Keluarga (orang tua) adalah pihak pertama dan

---

<sup>8</sup> Arif Fakhruddin, dan Siti Irfhamah (eds.), *Al Hidayah: AL- Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, Banten: PT. Penerbit Kalim di Bawah Koordinator Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al Qur’an (Revisi Terj.) Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur’an, Departemen Agama Republik Indonesia, t.th., hal.38.

<sup>9</sup> Hafizhullah, Makna Ma’ruf Dalam Al Qur’an, diunduh di website <http://hafizhullah.blogspot.co.id/2014/01/makna-maruf-dalam-al-quran.html>, pada tanggal 11 Mei 2018.

utama yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 34 Ayat 1 tahun 1945 Bab Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa Negara juga mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kesejahteraan anak-anak fakir miskin dan terlantar untuk dipelihara dan diperdayakan, yakni berbunyi sebagai berikut, “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.”<sup>10</sup> Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang. selain itu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Negara mengatur lebih rinci tentang perlindungan anak.

Merupakan tanggung jawab bersama tumbuh kembang anak. Keperluan mereka berupa pendidikan, kesehatan, dan perhatian kasih sayang disamping kebutuhan sandang dan pangan yang baik, agar mereka dapat mengembangkan pribadinya secara benar. Dengan terjaminnya kesejahteraan hidup primer maka kemandirian dalam memperoleh kesejahteraan hidup dimasa depan akan semakin berkualitas.

Merupakan tugas semua pihak yang merupakan komponen bangsa ini untuk peduli dengan merosotnya tingkat kesejahteraan anak. Perlu diperhatikan dan diperbaiki bersama, karena harapan dalam membina anak bangsa tergantung kesadaran dan perhatian kita sedini mungkin. Ingatlah janji Allah SWT berikut ini.

لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُفِيقْ مِّمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتٰهَا ۚ

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾ الطلاق: ٧

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S. ath-Thalaq[65]:7)<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pdf. , diunduh di website <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf>, tanggal 05 April 2018.

<sup>11</sup> Arif Fakhruddin, dan Siti Irhamah (eds.), *Al Hidayah: AL- Qur'an .....*, t.th., hal. 560.

Dewasa ini, bukan hal yang tabu jika orang tua tunggal yang tidak mempunyai biaya memadai dalam memberikan pendidikan, dan tidak memberi kasih sayang secara penuh kepada anak. Pernikahan dibawah usia belia dan kurangnya pendidikan seringkali menjadi hambatan bagi orang tua tunggal, terutama wanita pasca bercerai untuk menghidupi anak-anaknya.

Sudah diketahui secara umum kewajiban seorang ayah baik masih dalam terikat pernikahan maupun pasca perceraian, anak tetap menjadi tanggung jawab bersama, yakni ayah dan ibunya dalam memberikan kesejahteraan, akan tetapi seiring perkembangan jaman, kepedulian mengenai hal lumrah ini menjadi tergerus oleh sikap tidak bertanggung jawab, sehingga setelah terjadinya perceraian anak korban perceraian menjadi tidak diperhatikan secara penuh lagi kesejahteraannya bahkan lalai dalam bertanggung jawab.

Alasan mendasar peneliti mengambil perhatian kepada ekonomi dan pendidikan sebenarnya sangat sederhana. Jika anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang memadai dalam membekali kemandirian secara spiritual dan pengetahuan bagi anak menjadi lemah, itu berindikasi anak akan sulit dalam membangun rasa percaya diri dalam menjalani kehidupan yang semakin meluas ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan menjadi sarana mencerdaskan kehidupan manusia, yakni menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, memiliki akhlak yang mulia, cakap, berilmu, sehat, mandiri dan menjadi warga yang bermanfaat untuk orang banyak serta bertanggung jawab.

Dengan adanya perceraian, orang tua kandung dalam memberi kasih sayang secara penuh kepada anak. Pengarahan, perhatian dan perlindungan merupakan dasar pembentukan kejiwaan anak yang sehat. Merupakan perhatian mendasar bagi orang tua untuk memposisikan perannya secara optimal dimasa peralihan pubertas anak. Hal ini terjadi karena tingkat kesadaran dalam memberi nafkah anak pasca perceraian menurun dan bahkan ada yang tidak peduli karena telah memiliki keluarga baru.

Pemikiran yang salah ini menarik perhatian peneliti tentang kesejahteraan anak yang menjadi terabaikan pascaperceraian orang tuanya.

Mengenai tanggung jawab orang tua kepada anak tercantum di dalam Firman Allah SWT. Q.S. an Nisa[4]: 9

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩ :

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”<sup>12</sup>

Dalam ayat di atas bededidikasi bahwa memberikan kesejahteraan kepada anak agar tidak menjadi generasi yang lemah akal, fisik, dan finansial dimasa depan. Sudah sepatutnya seluruh komponen baik orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah kembali merenungkan mengenai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Hal ini seharusnya menjadi perhatian utama kita bersama, agar cita-cita bangsa terlaksana dan kesejahteraan dapat kita rasakan bersama.

Berdasarkan fokus bahasan di atas mengenai banyaknya anak yang biaya kesejahteraan pendidikannya terabaikan pascaperceraian orang tuanya, maka penulis merasa perlu adanya penulisan lebih lanjut dalam mengungkap data valid mengenai fenomena ini. Oleh karena itu penulis akan mengajukan penulisan yang berjudul **“Pelaksanaan Biaya Kesejahteraan Pendidikan Anak Pascaperceraian Orang Tua Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 dan Hukum Islam” Rumusan Masalah**

---

<sup>12</sup>Fakhrudin, Arif dan Siti Irhamah (eds.), *Al Hidayah: AL- Qur'an Tafsir...*, hal.79.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika pelaksanaan biaya kesejahteraan pendidikan anak pascaperceraian yang terjadi di masyarakat?
2. Apa saja faktor kelalaian orang tua dalam pelaksanaan biaya kesejahteraan pendidikan anak pascaperceraian berdasarkan prespektif Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 dan perspektif hukum Islam?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi pelaksanaan biaya kesejahteraan pendidikan anak pascaperceraian orang tua implementasi kajian Undang- undang Nomor 4 Tahun 1979 dan hukum Islam?

#### **B. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui problematika pelaksanaan biaya kesejahteraan pendidikan anak pascaperceraian orang tua yang terjadi di masyarakat.
2. Untuk mengidentifikasi faktor kelalaian pelaksanaan hukum terhadap kewajiban orang tua kepada anak pascaperceraian perspektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 dan perspektif hukum Islam.
3. Untuk mengetahui upaya pelaksanaan biaya kesejahteraan pendidikan anak pascaperceraian orang tua dalam implementasi kajian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 dan hukum Islam?

#### **C. Kegunaan Penulisan**

Hasil dari penulisan ini nantinya diharapkan oleh penulis dapat berguna untuk:

1. Kejelasan mengenai identifikasi problematika pelaksanaan biaya kesejahteraan pendidikan anak pascaperceraian terjadi di masyarakat.
2. Memberikan gambaran umum mengenai pelaksanaan biaya kesejahteraan pendidikan anak kepada anak pascaperceraian berdasarkan kajian Undang Nomor 4 Tahun 1979 dan hukum Islam

3. Memberikan gambaran umum mengenai pelaksanaan biaya kesejahteraan pendidikan anak kepada anak pascaperceraian dalam usaha menjaga tujuan dari *maqasid syariah* yang sehubungan dengan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-aql* (menjaga akal). kesadaran ini dimaksudkan agar tumbuh kembang anak dan pendidikan anak terjamin.

#### **D. Waktu dan Tempat Penelitian**

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) bulan, sesuai dengan ijin penelitian bulan, yakni dimulai dari tanggal 15 Mei 2018-16 Juli 2018 berdasarkan surat ijin riset nomor B-199/In.22/IV/PP.009/05/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 2018.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penulisan perpustakaan (*library research*) yang dilakukan di Perpustakaan Daerah Kotawaringin Barat, Perpustakaan Pengadilan Agama Pangkalan Bun, dan perpustakaan pribadi peneliti. Tempat penelitian ini sesuai dengan surat ijin riset nomor B-199/In.22/IV/PP.009/05/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 2018 yang telah diserahkan pada masing-masing tujuan riset.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Sepanjang jangkauan penulis, karya tulis ilmiah mengenai “Pelaksanaan Biaya Kesejahteraan Pendidikan Anak Pasca Perceraian Orang Tua Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 dan Hukum Islam dengan judul serupa salah satunya adalah sebagai berikut:

**Tabel**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

<b>NO</b>	<b>Penulis dan Judul Karya Tulis</b>	<b>Persamaan Dalam Penelitian</b>	<b>Perbedaan Dalam Penelitian</b>
1	Nizam, S.H. (B4B 003 129), Mahasiswa dari Program Megister Universitas Dipenogoro, Semarang, Tesis berjudul: “Kewajiban Orang Tua Laki-laki (Ayah) atas biaya Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian”	Dalam penelitian ini Penulis memfokuskan penelitian mengenai kewajiban orang tua laki-laki(ayah) atas biaya anak sah setelah terjadinya perceraian menggunakan metode kajian lapangan, yakni meneliti putusan di Pengadilan Agama Semarang.	Dalam penelitian penulis fokus penelitian pada Undang-Undang No.4 tahun 1979 dan perspektif hukum Islam mengenai kewajiban orang tua baik ayah maupun ibu terhadap kesejahteraan pendidikan anaknya pasca perceraian. Penulis melakukan penelitian dengan metode perpustakaan baik secara UU No 4 tahun 1979 dan kajian ayat al Qur'an mengenai kewajiban orang tua menggunakan metode kepustakaan mengenai kesejahteraan anak terutama mengenai pendidikan.
2	Endang Setya Rini, S.H. (B4B 003 082), Mahasiswa dari	Dalam penelitian ini Penulis memfokuskan	Penulis Endang Setya Rini, S.H., lebih memfokuskan

NO	Penulis dan Judul Karya Tulis	Persamaan Dalam Penelitian	Perbedaan Dalam Penelitian
	Program Pascasarjana Universitas Dipenogoro, Semarang, Tesis berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Wonosobo”	kesejahteraan anak yang patut untuk dilindungi distribusinya sehingga tidak ada lagi anak yang terlantar.	penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap anak yang berpoligami, sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan perlindungan terhadap kesejahteraan pendidikan anak pasca perceraian.
3	Achmad Asfi Burhanudin. Artikel dengan judul: “Kewajiban Orang Tua Atas Hak Anak Pasca Perceraian	Dalam artikel ini penulis membahas mengenai hak anak dalam memperoleh kesejahteraannya pasca perceraian orang tuanya	Artikel penulis berfokus terhadap Undang-Undang No.4 tahun 1979 dan perspektif hukum Islam yang mengatur mengenai kewajiban orang tua atas hak anak pasca perceraian, terutama mengenai kesejahteraan pendidikan anak, sedangkan dalam penelitian penulis lebih meluas lagi meliputi kajian hermeneutika QS. an Nisa[4]:9 dan



NO	Penulis dan Judul Karya Tulis	Persamaan Dalam Penelitian	Perbedaan Dalam Penelitian
			didukung dengan UU No 4 tahun 1979 mengenai kewajiban orang tua mengenai kesejahteraan anak.
4	Tedy Sudrajat. Jurnal Hukum dengan Judul: "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia (Kanon Jurnal Hukum No.054 Th. XIII [Agustus, 2011] pp.1111-132)	penulis membahas mengenai implementasi hak anak sebagai hak asasi manusia dalam perspektif sistem hukum keluarga di Indonesia Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Kabupaten/Kota serta penduduk Indonesia berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat, selain itu Upaya	Penulisan jurnal hukum Tedy Sudrajat berfokus dengan hak anak dalam hak asasi manusia, sedangkan dalam penulisan tesis yang penulis ingin teliti lebih berfokus kepada Undang-Undang No.4 tahun 1979 dan perspektif hukum Islam

NO	Penulis dan Judul Karya Tulis	Persamaan Dalam Penelitian	Perbedaan Dalam Penelitian
		perlindungan hukum terhadap hak asasi anak sebagai hak asasi manusia dalam persepektif sistem hukum keluarga di Indonesia,	
5	Alif Darmawan Maruszama, S.H. (NIM.031214153108), Mahasiswa Pascasarjana Universitas Airlangga tahun 2016, dengan Tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	penulis membahas mengenai perlindungan secara hukum sebagai saksi perkara pidana sistem peradilan pidana anak mengenai hak-haknya.	Perlindungan yang dimaksudkan untuk memberikan keamanan untuk anak dalam penulisan saudara Alif dan penelitian yang akan diteliti sangat berbeda, walaupun memiliki subjek yang sama, dalam objek penelitian peneliti lebih berfokus kepada Undang-Undang No.4 tahun 1979 dan perspektif hukum Islam mengenai perlindungan kesejahteraan pendidikan anak pasca perceraian orang tuanya, sehingga

Biaya Kesejahteraan Pendidikan Anak Pasca Perceraian

NO	Penulis dan Judul Karya Tulis	Persamaan Dalam Penelitian	Perbedaan Dalam Penelitian
			walaupun tidak memiliki orang tua yang utuh, kesejahteraan pendididkannya tetap terjamin.



## BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

### A. Kerangka Teori

Kerangka kerja teoritis dalam penulisan ini membahas keterhubungan antar variabel yang dianggap terintegrasi dalam dinamika situasi yang akan diteliti. Melalui pengembangan kerangka kerja konseptual, memungkinkan pengujian untuk menguji beberapa hubungan antar variabel, sehingga dapat diambil pemahaman yang komprehensif atas masalah yang sedang diteliti secara empiris. Dengan dasar pemikiran tersebut maka penulis menggunakan beberapa teori yang berkaitan, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Teori Pendidikan Anak

Dalam UU Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 disebutkan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>13</sup>

Kemudian pada UU Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa:<sup>14</sup>

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Berdasarkan penjelasan UU diatas telah dapat menjadi gambaran bahwa pendidikan merupakan hal mutlak didapatkan semua

---

<sup>13</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, PDF.

<sup>14</sup>*Ibid.*

masyarakat Indonesia terutama anak-anak yang merupakan aset bangsa di masa depan.

Secara Etimologi atau asal-usul, kata pendidikan dalam bahasa Inggris disebut dengan education, dalam bahasa Latin pendidikan disebut dengan educatum yang tersusun dari dua kata yaitu E dan Duco dimana kata E berarti sebuah perkembangan dari dalam ke luar atau dari sedikit banyak, sedangkan Duco berarti perkembangan atau sedang berkembang. Jadi, Secara Etimologi pengertian pendidikan adalah proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional Indonesia). bahwa pengertian pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.<sup>15</sup>

Orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam mendidik anaknya, salah satu dari program pendidikan adalah mendidiknya untuk melaksanakan shalat. Shalat sangat diwajibkan bagi umat beragama Islam, karena shalat adalah rukun Islam kedua setelah syahadat. Rasulullah SAW memikulkan tanggung jawab pendidikan anak ini secara utuh kepada kedua orang tua. Dari Ibnu radhiallahu ‘anhu, bahwa dia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda<sup>16</sup>,

---

<sup>15</sup>Diunduh di website <http://www.artikelsiana.com/2015/08/pengertian-pendidikan-tujuan-manfaat.html>, tanggal 12 Mei 2018.

<sup>16</sup>Muhammad Nur Ichwan Muslim, di unduh di <https://www.ponpes-azzikra.org/berita-pendidikan-anak-tanggung-jawab-siapa.html>, 18 September 2018, Pukul 09.40 WIB.

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْزُوقِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا  
سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ  
رَاعٍ وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ كَتَبَ رُزَيْقُ بْنُ حَكِيمٍ إِلَى ابْنِ شِهَابٍ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي الْقُرَى  
هَلْ تَرَى أَنَّ أَجْمَعَ وَرُزَيْقُ عَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ وَرُزَيْقُ  
يَوْمَئِذٍ عَلَى أَيْلَةٍ فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَنَا أَسْمَعُ يَأْمُرُهُ أَنْ يَجْمَعَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ  
بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُولٌ عَنْ  
رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ  
فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْنُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ  
أَنَّ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Muhammad Al Marwazi berkata, telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepada kami Salim bin 'Abdullah dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin." Al Laits menambahkan; Yunus berkata; Ruzaiq bin Hukaim menulis surat kepada Ibnu Syihab, dan pada saat itu aku bersamanya di Wadi Qura (pinggiran kota), "Apa pendapatmu jika aku mengumpulkan orang untuk shalat Jum'at?" -Saat itu Ruzaiq bertugas di suatu tempat dimana banyak jama'ah dari negeri Sudan dan yang lainnya, yaitu di negeri Ailah-. Maka Ibnu Syihab membalasnya dan aku mendengar dia memerintahkan (Ruzaiq) untuk mendirikan shalat Jum'at. Lalu mengabarkan bahwa Salim telah menceritakan kepadanya, bahwa 'Abdullah bin 'Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta

pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: "Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhori Nomor 844)

Abdullah bin Umar radhiallahu ‘anhuma berkata,<sup>17</sup>

أَدَّبَ ابْنُكَ فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْهُ مَاذَا أَدَّبْتَهُ وَمَاذَا عَلَّمْتَهُ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ بَرِّكَ وَطَوَاعِيَّتِهِ لَكَ

“Didiklah anakmu, karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajaran yang telah engkau berikan kepadanya. Dan dia juga akan ditanya mengenai kebaikan dirimu kepadanya serta ketaatannya kepada dirimu”.

Pendidikan dalam arti luas yakni satu proses mengajar dan belajar yang bertimbal balik dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan, dan kedudukan pendidikan sebagai satu proses membentuk yang mengambil masa untuk mendapatkan hasil. Ada juga yang mendefinisikan arti pendidikan dengan proses mengasuh dan mendidik, membentuk sikap belajar selain membiasakan proses memberi pelajaran dan mengajari sesuatu yang baru.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Muhammad Nur Ichwan Muslim, di unduh di <https://www.ponpes-azzikra.org/berita-pendidikan-anak-tanggung-jawab-siapa.html>, 18 September 2018, Pukul 09.40 WIB.

<sup>18</sup>Kamarul Azmi Jasmi, *Pendidikan Islam: Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran*, Johor Darul Ta'zim Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2007, hal. 1-4.



Kelahiran anak adalah suatu yang sangat diimpikan oleh seorang sepasang kekasih yang sudah menjalani pernikahan atau yang sering disebut dengan suami istri. Hadits Bukhari nomor 1270 dalam Fathul Baari menerangkan keadaan seorang anak yang dilahirkan sesuai hadits tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ يُصَلِّي عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ مُتَوَفَّى وَإِنْ كَانَ لِعِيَّةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ يَدْعِي أَبَوَاهُ الْإِسْلَامَ أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَهْلَ صَارِحًا صَلَّي عَلَيْهِ وَلَا يُصَلِّي عَلَى مَنْ لَا يَسْتَهْلُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سَقَطَ فَإِنْ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يُمَجْسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا } { الْآيَةُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib berkata, Ibnu Syihab: "Setiap anak yang wafat wajib dishalatkan sekalipun anak hasil zina karena dia dilahirkan dalam keadaan fithrah Islam, jika kedua orangnya mengaku beragama Islam atau hanya bapaknya yang mengaku beragama Islam meskipun ibunya tidak beragama Islam selama anak itu ketika dilahirkan mengeluarkan suara (menangis) dan tidak dishalatkan bila ketika dilahirkan anak itu tidak sempat mengeluarkan suara (menangis) karena dianggap keguguran sebelum sempurna, berdasarkan perkataan Abu Hurairah radliallahu 'anhu yang menceritakan bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Tidak ada seorang anakpun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fithrah. Maka kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?". Kemudian Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, (mengutip firman Allah QS Ar-Ruum: 30 yang artinya: ('Sebagai fitrah

Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu"). (HR.Bukhori: 1270)<sup>19</sup>.

## 2. Teori Tanggung Jawab

Orang yang bertanggung jawab sesungguhnya telah memiliki modal yang sangat berharga untuk menjadi orang yang adil. Dengan rasa tanggung jawab yang dimilikinya, ia akan selalu berusaha mengambil keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan, baik di hadapan sesama manusia maupun di hadapan Allah. Inilah keadilan yang hakiki. Bahkan mungkin semua pihak merasa kecewa. Namun, karena ia yakin bahwa keputusan tersebut memiliki argumen yang paling bisa dipertanggungjawabkan, keputusan itu pun ia ambil. Tentu saja dengan risiko apapun.<sup>20</sup>

Dalam pergaulan sehari-hari bertanggung jawab pada umumnya diartikan sebagai “berani menanggung risiko (akibat) dari suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan”. Atau sering pula diartikan sebagai “berani mengakui suatu perbuatan atau tindakan yang telah dilakukan”. Pengertian tanggung jawab tersebut belum cukup, karena yang bersangkutan tidak pernah memikirkan apakah perbuatan atau tindakannya itu sesuai dengan nilai-nilai hidup yang luhur, apakah sesuai dengan nilai-nilai susila yang berlaku dalam kehidupan manusia yang sopan beradab, dan beragama.<sup>21</sup>

Dari anak-anak yang menjadi baik, orang tua menyadari bahwa anak-anak belajar bertanggung jawab dalam langkah-langkah kecil dan kemandirian yang sehat selama awal dewasa dimulai dengan ketergantungan yang sehat selama awal masa anak-anak. Anda tidak akan mengajarkan anak bagaimana berenang dengan melemparkan mereka ke dalam air begitu saja. Demikian juga orang tua

---

<sup>19</sup>Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hal. 342.

<sup>20</sup>Abdullah Munir, *Pendidikan Karakter*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2010, hal. 92

<sup>21</sup>Uyoh Sadulloh, dkk, *Pedagogik (Ilmu Mendidik)*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010, hal. 175.

mengajarkan tanggung jawab sedikit demi sedikit dengan berjalannya waktu, dengan membantu anak-anak membangun keberhasilan mereka. Inilah apa yang telah kami pelajari dari cara bagaimana orang tua membesarkan anak-anak yang bertanggung jawab. Karena tujuan akhir dari keseluruhan upaya yang kita lakukan dalam mendidik anak adalah untuk memungkinkan anak-anak kita hidup tanpa kita.<sup>22</sup>

Tanggung jawab itu dapat dibedakan menurut keadaan manusia atau hubungan yang dibuatnya. Atas dasar ini, lalu dikenal beberapa jenis tanggung jawab, yaitu :<sup>23</sup>

a. Tanggung Jawab Terhadap Diri Sendiri

Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Contohnya: Rudi membaca sambil berjalan. Meskipun sebentar-bentar ia melihat ke jalan tetap juga ia lengah dan terperosok ke sebuah lubang. Ia harus beristirahat diruma beberapa hari. Konsekuensi tinggal dirumah beberapa hari merupakan tanggung jawab ia sendiri akan kelengahannya.

b. Tanggung Jawab kepada Keluarga

Keluarga merupakan masyarakat kecil. Keluarga terdiri dari suami-istri, ayah-ibu dan anak-anak, dan juga orang lain yang menjadi anggota keluarga. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga. Tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan. Contohnya: Dalam sebuah keluarga biasanya memiliki peraturan-peraturan sendiri yang bersifat mendidik, suatu hal peraturan tersebut dilanggar oleh salah satu anggota keluarga.

---

<sup>22</sup>William Sears, *Anak Cerdas: Peranan Orang Tua dalam Mewujudkannya*, Jakarta: Emerald Publishing, 2004, hal. 398-399.

<sup>23</sup>Website Gudarma University, diunduh di <http://zaysscremeemo.blogspot.com/2012/06/pengertian-tanggungjawab.html>, 18 September 2018, Pukul 09.32 WIB.

Sebagai kepala keluarga (Ayah) berhak menegur atau bahkan memberi hukuman. Hukuman tersebut merupakan tanggung jawab terhadap perbuatannya.

c. Tanggung Jawab terhadap Masyarakat

Pada hakekatnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Karena membutuhkan manusia lain maka ia harus berkomunikasi dengan manusia lain tersebut. Sehingga dengan demikian manusia di sini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab tersebut. Wajarlah apabila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Contohnya: Safi'i terlalu congkak dan sombong, ia mengejek dan menghina orang lain yang mungkin lebih sederhana dari pada dia. Karena ia termasuk dalam orang yang kaya dikampungnya. Ia harus bertanggung jawab atas kelakuannya tersebut. Sebagai konsekuensi dari kelakuannya tersebut, Safi'i dijaui oleh masyarakat sekitar.

d. Tanggung Jawab Terhadap Bangsa dan Negara

Suatu kenyataan lagi, bahwa setiap manusia, tiap individu adalah warga negara suatu negara. Dalam berfikir, berbuat, bertindak, bertingkah laku manusia terikat oleh norma-norma atau ukuran-ukuran yang dibuat oleh negara. Manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Bila perbuatan manusia itu salah, maka ia harus bertanggung jawab kepada negara. Contohnya: Dalam novel "Jalan Tak Ada Ujung" karya Muchtar Lubis, Guru Isa yang terkenal sebagai guru yang baik, terpaksa mencuri barang-barang milik sekolah demi rumah tangganya. Perbuatan guru Isa ini harus pula dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, kali perbuatan itu diketahui ia harus berurusan dengan pihak kepolisian dan pengadilan.

e. Tanggung Jawab Terhadap Allah Swt

Allah SWT menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan untuk mengisi kehidupannya, manusia mempunyai tanggung jawab langsung terhadap perintah Allah SWT. Sehingga tindakan atau perbuatan manusia tidak bisa lepas dari pengawasan Allah SWT yang dituangkan dalam kitab suci AlQur'an melalui agama islam. Pelanggaran dari hukuman-hukuman tersebut akan segera diperingati oleh Allah dan jika dengan peringatan yang keraspun manusia masih juga tidak menghiraukannya maka Allah akan melakukan kutukan. Contohnya: Seorang muslim yang taat kepada agamanya maka ia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan kepada Allah. Karena ia menghindari hukuman yang akan ia terima jika tidak taat pada ajaran agama. kedua yang harus dilakukan seorang muslim kepada Allah SWT, adalah memiliki rasa tanggung jawab atas amanah yang diberikan padanya. Karena pada hakekatnya, kehidupan inipun merupakan amanah dari Allah SWT. Oleh karenanya, seorang mukmin senantiasa meyakini, apapun yang Allah berikan padanya, maka itu merupakan amanah yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban dari Allah.<sup>24</sup>

Tanggung jawab pendidikan anak ini harus ditangani langsung oleh kedua orang tua. Para pendidik yang mendidik anak di sekolah-sekolah, hanyalah partner bagi orang tua dalam proses pendidikan anak. Orang tua yang berusaha keras mendidik anaknya dalam lingkungan ketaatan kepada Allah, maka pendidikan yang diberikannya tersebut merupakan pemberian yang berharga bagi sang anak, meski terkadang hal itu jarang disadari. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Al-Hakim, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

---

<sup>24</sup>Muhammad Nur Ichwan Muslim, di unduh di <https://www.ponpes-azzikra.org/berita-pendidikan-anak-tanggung-jawab-siapa.html>, 18 September 2018, Pukul 09.40 WIB.

ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن

“Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik.” (HR. Al Hakim: 7679).<sup>25</sup>

Mengenai tanggung jawab pendidikan anak terdapat perkataan yang berharga dari imam Abu al-Hamid al-Ghazali rahimahullah. Beliau berkata, “perlu diketahui bahwa metode untuk melatih/mendidik anak-anak termasuk urusan yang paling penting dan harus mendapat prioritas yang lebih dari urusan yang lainnya. Anak merupakan amanat di tangan kedua orang tuanya dan qalbunya yang masih bersih merupakan permata yang sangat berharga dan murni yang belum dibentuk dan diukir. Dia menerima apa pun yang diukirkan padanya dan menyerap apa pun yang ditanamkan padanya. Jika dia dibiasakan dan dididik untuk melakukan kebaikan, niscaya dia akan tumbuh menjadi baik dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Dan setiap orang yang mendidiknya, baik itu orang tua maupun para pendidiknya yang lain akan turut memperoleh pahala sebagaimana sang anak memperoleh pahala atas amalan kebaikan yang dilakukannya. Sebaliknya, jika dibiasakan dengan keburukan serta ditelantarkan seperti hewan ternak, niscaya dia akan menjadi orang yang celaka dan binasa serta dosa yang diperbuatnya turut ditanggung oleh orang-orang yang berkewajiban mendidiknya” (Ihya Ulum al-Din 3/72).<sup>26</sup>

Senada dengan ucapan al-Ghazali di atas adalah perkataan al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah, “Siapa saja yang mengabaikan pendidikan anaknya dalam hal-hal yang berguna baginya, lalu dia membiarkan begitu saja, berarti dia telah berbuat kesalahan yang fatal. Mayoritas penyebab kerusakan anak adalah

---

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>Muhammad Nur Ichwan Muslim, di unduh di <https://www.ponpes-azzikra.org/berita-pendidikan-anak-tanggung-jawab-siapa.html>, 18 September 2018, Pukul 09.40 WIB.

akibat orang tua mengabaikan mereka, serta tidak mengajarkan berbagai kewajiban dan ajaran agama. Orang tua yang menelantarkan anak-anaknya ketika mereka kecil telah membuat mereka tidak berfaedah bagi diri sendiri dan bagi orang tua ketika mereka telah dewasa. Ada orang tua yang mencela anaknya yang durjana, lalu anaknya berkata, “Ayah, engkau durjana kepadaku ketika kecil, maka aku pun durjana kepadamu setelah aku besar. Engkau menelantarkanku ketika kecil, maka aku pun menelantarkanmu ketika engkau tua renta.” (Tuhfah al-Maudud hal. 125).<sup>27</sup>

### 3. Teori *Welfare State*

*Welfare state* adalah gagasan yang telah lama lahir, dirintis oleh Prusia di bawah Otto Von Bismarck sejak tahun 1850-an. Dalam Encyclopedia Americana disebutkan bahwa *welfare state* adalah “*a form of government in which the state assumes responsibility for minimum standards of living for every person*” (bentuk pemerintahan di mana negara dianggap bertanggung jawab untuk menjamin standar hidup minimum bagi setiap warga negaranya). *Welfare state* adalah negara kesejahteraan, konsep ini muncul menggantikan konsep legal state atau Negara penjaga malam.<sup>28</sup>

Negara memiliki peran penuh dalam terwujudnya kesejahteraan yang menyentuh semua lapisan rakyat, terutama anak-anak. Peran serta negara dalam memberika perlindungan terhadap hak anak dapat membentuk karakter dan pribadi yang baik untuk masa depan negara. Menurut Ibnu Maskawaih dalam kitabnya yang berjudul *Tahdzibul Akhlaq* mengemukakan bahwa

“jiwa kanak-kanak itu masih suci, belum mempunyai coretan atau gambaran apapun, belum mempunyai faham, ide, atau cita-cita tertentu yang menjadi kecenderungannya, maka jiwa-jiwa yang

---

<sup>27</sup>Muhammad Nur Ichwan Muslim, di unduh di <https://www.ponpes-azzikra.org/berita-pendidikan-anak-tanggung-jawab-siapa.html>, 18 September 2018, Pukul 09.40 WIB.

<sup>28</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006. hal. 14.

dicoret dengan satu lukisan atau gambaran tertentu langsung diterimanya, maka ia selanjutnya akan berkembang menurut kebiasaan yang selalu dilakukannya.<sup>29</sup>

Berdasarkan kutipan di atas, maka dapat penulis menyimpulkan bahwa anak dalam perilakunya yang masih polos harus mendapatkan pengayoman yang baik sehingga dapat membentuk karakter anak yang baik pula. Masa kanak-kanak adalah masa yang berharga sehingga perhatian besar untuk semua pihak haruslah dijaga.

Mengenai kewajiban orang tua terhadap kesejahteraan anak tercantum dalam QS. An Nisa[4]:9

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۚ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللّٰهُ ۚ لَا يَكْفِ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾ الطلاق: ٧

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S. ath-Thalaq[65]:7)<sup>30</sup>

Berdasarkan kandungan ayat di atas, Allah memberi teguran kepada para orang tua untuk tidak meninggalkan anaknya dalam keadaan yang lemah. Lemah disini dapat diartikan kepada lemah akal (tidak berpendidikan), lemah fisik (lemah secara jasmani karena kurangnya tingkat kesehatan dan asupan makanan), dan Finansial kemampuan untuk mandiri). Prioritas dalam mendidik, melindungi, dan mengayomi anak merupakan investasi yang besar untuk masa depan anak, sehingga dalam pelaksanaannya perlu adanya perhatian oleh semua pihak yakni pemerintah, keluarga, dan masyarakat.

---

<sup>29</sup>Miftahul Huda, *Idealitas Pendidikan Anak*, Malang: UIN Malang Press, 2009, hal. 9.

<sup>30</sup>Fakhrudin, Arif dan Siti Irhamah (eds.), *Al Hidayah: AL- Qur'an Tafsir...*, hal.79.



Anak merupakan penerus cita-cita bangsa, keberhasilan dalam perhatian yang besar ini dalam masa tumbuh kembang anak sangatlah berpengaruh terhadap masa depan bangsa. Hal ini sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945, yaitu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Hal ini seharusnya menjadi perhatian utama kita bersama, agar cita-cita bangsa terlaksana dan kesejahteraan dapat kita rasakan bersama.

Selain itu mengenai hak dan tanggung jawab dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 34 berbunyi sebagai berikut.<sup>31</sup>

- a. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.  
Hak : Fakir miskin dan anak-anak terlantar berhak mendapatkan perawatan dari negara.  
Kewajiban : Negara wajib memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.
- b. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.  
Hak : Setiap masyarakat yang lemah dan tidak mampu berhak mendapatkan jaminan sosial dan diberdayakan oleh negara.  
Kewajiban : Negara wajib memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu dan wajib mengembangkan sistem jaminan sosial.
- c. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.  
Hak : Setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan.  
Kewajiban : Negara harus menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

---

<sup>31</sup>Undang-Undang Dasar tahun 1945, PDF.

- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

#### 4. Teori *Maslahah al-Mursalah*

Menurut terminologis, kata *al-maslahah* adalah seperti lafaz al-manfaa'at, baik artinya maupun *wajan*-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *masdar* yang sama artinya dengan kalimat *as-Salah*, seperti halnya lafaz al-manfa'at sama artinya al-naf'u. Manfaat yang dimaksud oleh adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya. Adapun *al-mursalah* adalah syara' memutlakkan hukum tersebut tidak terdapat dalam kaidah syara' yang menjadi penguat atau penguatnya. Dengan demikian, *maslahah al-mursalah* adalah suatu kemashlahatan yang bertujuan untuk memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya, namun tidak disinggung oleh *syara'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sehingga jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar.

Pembentukan hukum dengan cara *maslahah al-mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemashlahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan juga kerusakan manusia. Teori *maslahah al-mursalah*<sup>32</sup> sebagai upaya kebijakan pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan rakyat miskin, sehingga untuk mencegah keburukan dari kelalaian orang tua terhadap kesejahteraan anaknya pasca perceraian. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang selalu hidup di masyarakat (*the living law*).<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hal. 117. Lihat Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, hal. 79.

<sup>33</sup>R. Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Cet.1, Alumni: Bandung, 1993, hal. 1. Eugen Erilih (1862-1922) dan Friedrich Car Van Savigny mengatakan *the living law* adalah kebiasaan yang sekarang berlaku di masyarakat, khususnya norma yang tercipta dari aktivitas-aktivitas sejumlah kelompok dan di dalam kelompok itu warga masyarakat terlibat sehingga hukum yang mendominasi kehidupan masyarakat, meskipun tidak selalu diubah

## 5. Teori *Maqasid Syariah*

Qawaid merupakan bentuk jamak dari qaidah, yang kemudian dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah kaidah yang berarti aturan atau patokan. Ahmad Warson menambahkan bahwa, kaidah bisa berarti *al-asas* (dasar atau pondasi), *al-Qanun* (peraturan dan kaidah dasar), *al-Mabda'* (prinsip), dan *al-nasaq* (metode atau cara).<sup>34</sup>

Secara etimologi kaidah-kaidah fikih adalah dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih.<sup>35</sup> Sedangkan dalam tinjauan terminology kaidah punya beberapa arti, menurut Dr. Ahmad Asy-Syafi'i dalam buku *ushul fiqh Islami*, mengatakan bahwa kaidah itu adalah:

Kaum yang bersifat universal (*kulli*) yang diakui oleh satuan-satuan hukum juz'i yang banyak.<sup>36</sup>

Sedangkan menyoritas ulama *ushul fiqh* mendefenisikan kaidah dengan:

"Hukum yang biasa berlaku yang bersesuaian dengan sebagian besar bagianya"

Kewajiban (*taklif*) tujuan syariah (*maqashid syariah*) dalam Islam yang berkaitan dengan segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan dunia baik *diniyyah* maupun *dunawiyyah* ialah primer (*dharuriyyah*). Untuk memelihara *dharuriyyah* ini, ada dua faktor, yaitu pertama, mewujudkan segala yang mengokohkan perwujudannya dengan menggerakkan segala yang menjadi sebab perwujudan, dan kedua, mengerjakan segala yang menolak

---

menjadi formal ke dalam proposisi-proposisi yang legal, *the living law* mencerminkan nilai-nilai kehidupan masyarakat.

<sup>34</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, cet ke-3, 2010, hal. 2.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 4.

kecederaan yang mungkin menyimpannya atau diduga akan menyimpannya dengan meninggalkan segala yang merusakkannya.<sup>37</sup>

Dalam menegakkan kewajiban (*taklif*) tujuan syariah (*maqashid syariah*) primer (*dharuriyyah*) maka ada lima unsur pokok yang harus dijaga yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>38</sup> Berkaitan dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*), maka ada lima kaidah *fiqhiyah* (*al Qawa'id al khamsah*). Kaidah-kaidah tersebut ialah sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Al-Umur bimaqasidih: segala urusan bergantung kepada tujuannya.
- b. Al-Darar Yuzal: kemudaratkan harus dimudaratkan.
- c. Al-'Adah Muhakkamah: kebiasaan dapat menjadi hukum.
- d. Al-Yaqien layazul au layuzal bi al-syak: keyakinan tidak dapat hilang karena adanya keraguan.
- e. Al-Masyaqah Tajlib At-Taisir: kesukaran mendatangkan kemudahan.

Sehubungan dengan kaidah *Al-Darar Yuzal* (kemudaratkan harus dimudaratkan), maka timbangan kaidah *fiqhiyah*-nya ialah<sup>40</sup>

دَرْءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى حُلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :“Menolak mafsadat didahulukan daripada mendatangkan maslahat”

Dari kaidah *fiqhiyah* diatas maka menolak mafsadah lebih didahulukan, selain itu meskipun sudah teregestrasi dan tercatat lengkap, faktor kesalahan manusia pasti ada dan sudah seharusnya kehati-hatian untuk menghindari hal itu diutamakan. Untuk lebih jelas

---

<sup>37</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT. Pusataka Rizzki Putra, 2013, hal. 118-119.

<sup>38</sup>Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 127.

<sup>39</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum*, hal. 130.

<sup>40</sup>Shalih bin Fauzan bin Abdilllah Al-Fauzan, *Rambu-rambu Syari'at Praktis Fiqih Wanita*, alih bahasa Abu Ahmad Fattah , Solo:As-Salam, 2013, hal. 156.

memaknai kaidah *fiqhiyah* diatas maka kadar *mafsadat* perlu penjabaran kaidah *fiqhiyah* lainnya, yaitu<sup>41</sup>

الضَّرُورَاتُ يَزَالُ

Artinya:” Kemudharatan harus dihilangkan.”<sup>42</sup>

Dharurat bermakna sesuatu ( bahaya ) yang menimpa manusia jika ditinggalkan sekiranya tak ada sesuatu lain yang dapat menempati posisinya. Sebagian ulama berargumen bahwa hal yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa atau hilangnya anggota tubuh. Sedangkan kebutuhan ialah sesuatu ( bahaya ) yang menimpa manusia jika ditinggalkan namun posisinya masih dapat diselesaikan dengan hal lain. Namun yang perlu diperhatikan adalah syarat - syarat untuk memenuhi kaidah ini karena banyak orang yang mengambil dispensasi dari kaidah ini tanpa memperhatikan syaratnya. Diantaranya : Pertama, dharurat dapat dihilangkan dengan melakukan yang dilarang. Kedua, tidak menemukan solusi lain. Ketiga, yang dilarang lebih kecil (resikonya) daripada *dharurat*.<sup>43</sup>

Dari kaidah *fiqhiyah* inilah dapat kita tarik kesimpulan bahwa apabila dihadapkan kedalam dua kemudharatan, maka kemudharatan yang diambil adalah kemudharatan yang lebih ringan berpondasikan penegakkan tujuan syariah (*maqashid syariah*) yang terdapat dalam kaidah primer (*dharuriyyah*).

## B. Konseptual Penulisan

Untuk menjawab rumusan masalah pada bab I, maka diperlukan konseptual penulisan yang kongkrit dan empiris. Dalam hal penulisan “Pelaksanaan Biaya Kesejahteraan Pendidikan Anak Pascaperceraian Orang Tua Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 dan

---

<sup>41</sup>A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hal. 75.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 48.

<sup>43</sup> Al-Zarqa, Syarh , *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Maktabah Al-Syamilah Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, t.th., hal. 48.

Hukum Islam”, harus digambarkan hubungan kewajiban orang tua kepada anak pasca cerai yang ditekankan untuk tetap memberikan kesejahteraan hak anak untuk biaya pendidikan dan kesehatannya. Penulis dapat memulai dengan mengidentifikasi dalil Al Qur’an dan hadis, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggunakan teori Pendidikan anak, teori tanggung jawab, teori *Welfare State*, teori *masalah al mursalah*, kemudian mengkolerasikan-nya dengan maqasid syariah.

Dengan konseptual penulisan ini diharapkan bisa menjawab rumusan masalah mengenai kewajiban orang tua dalam upaya pelaksanaan biaya kesejahteraan pendidikan anak pasca perceraian terutama mengenai biaya pendidikan dan pelayanan kesehatan.

## BAB III

# METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian ini berkaitan dengan sosiologi hukum yang merupakan jenis aksiologi dalam ilmu hukum<sup>44</sup> yang menyertakan fakta sosial (*law in action*)<sup>45</sup> dengan menggunakan paradigma kualitatif. Metode kualitatif ialah metode penulisan yang biasanya memerlukan data kata-kata tertulis, peristiwa, dan perilaku yang dapat diamati.<sup>46</sup> Melalui penulisan perpustakaan (*library research*) yang merupakan jenis penulisan kualitatif, penulis berusaha mengumpulkan data valid yang kongkrit dan empiris.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang merupakan jenis aksiologi yang menyertakan fakta sosial (*law in action*) dalam ilmu hukum yang penulis maksudkan dalam usaha mengumpulkan data yang valid ialah dengan melakukan pendekatan teks Undang-Undang yang berlaku, konteks, dan kontekstualisasi perspektif hukum Islam melalui pendekatan *mursahah al mursalah*.

Metode *Maslahah al Mursalah* penerapannya ialah dengan memahami prinsip-prinsip umum teks Undang-Undang dan teks *Al Qur'an* sesuai teori modernitas yakni teori pendidikan anak, tanggung

---

<sup>44</sup>Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014, hal. 9. Pada tataran aksiologi seorang ilmuan hukum atau penstudi hukum harus mampu menilai secara moral baik dan buruknya suatu studi hukum itu sendiri.

<sup>45</sup>*Ibid.*, hal. 11.

<sup>46</sup>Sugeng D. Triswanto, *Skripsi & Menghadapi Presentasi Bebas Stres*, Yogyakarta: PT. Suka Buku, 2010, hal. 19.

jawab, yang membahas masyarakat moderen, didalam masyarakat moderen akan ada penemuan-penemuan, lalu penemuan tersebut bisa menyebabkan proses industrialisasi yang orang-orangnya bersifat kapitalis (orang yang kuat akan semakin kuat, orang yang lemah akan semakin lemah) terkait permasalahan, kemudian memformulasikannya dan merealisasikannya kedalam pandangan spesifik di masa sekarang.<sup>47</sup> Kemudian melakukan sinkronisasi dengan kaidah *fiqhiyah*, yaitu sehubungan dengan *maqasid syariah* mengenai perlindungan terhadap kewajiban orang tua dalam upaya mensejahterakan anak pasca perceraian.

Dengan teori pendidikan anak, tanggung jawab, dan *mursahah al murshalah* yang dikombinasikan dengan kaidah *fiqhiyah*, yaitu sehubungan dengan *maqasid syariah* mengenai *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-aql* (menjaga akal) serta Kompilasi hukum Islam (KHI). Kesadaran ini dimaksudkan agar tumbuh kembang anak dan pendidikan anak terjamin.

## **B. Objek dan Subjek Penelitian**

Sumber data dari penelitian ini terdiri atas dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data ini terjabarkan sebagai berikut:

### **1. Subjek (Data Primer)**

Subjek atau data primer yang dimaksud dalam penelitian ini ialah tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku mengenai perlindungan hak-hak anak, kamus, buku, jurnal, artikel, dan koran online mengenai Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### **2. Objek (Data Sekunder)**

Objek atau data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini ialah, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terkait masalah

---

<sup>47</sup>Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsudin (eds.), *Studi Al Qur'an Kontemporer*, hal. 47.



pelaksanaan biaya kesejahteraan pendidikan anak pascaperceraian orang tua, yakni seberapa besar anak pascaperceraian orang tuanya, pendidikan anak menjadi hal yang tidak terjamin karena tidak utuhnya pemberi nafkah dan pemberi kasih sayang. Untuk melindungi hak anak tersebut dan mewujudkan kewajiban orang tua maka permasalahan ini akan diteliti menggunakan teori pendidikan anak, teori tanggung jawab, teori *masalah al mursalah*, dan teori *maqasid syariah*.

### C. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, pengumpulan data dalam metode penulisan ilmiah digali dari sumber kepustakaan. Berkenaan dengan itu, pengumpulan data dilakukan dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Mengumpulkan materi pustaka dan materi lainnya yang akan dipilih sebagai sumber data, baik data primer maupun sekunder yang memuat mengenai pelaksanaan biaya kesejahteraan pendidikan anak pascaperceraian orang tua dalam kajian Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 dan hukum Islam.
2. Membaca dan menelaah data pustaka primer dan sekunder mengenai substansi rekonstruksi kesejahteraan pendidikan orang tua kepada anak pasca cerai.
3. Mengklarifikasi data dari sari teks dengan pendekatan teks, konteks, dan kontekstualisasi merujuk kepada rumusan masalah dalam penulisan. Hal itu dilakukan melalui seleksi terhadap sari teks yang sudah disusun sehingga menjadi data yang mempunyai validasi yang dapat menjadi rujukan yang berintegritas.

#### **D. Metode Pengolahan Dan Analisis Data**

Secara umum analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan dari apa yang diperoleh dari suatu proses kerja sejak awal. Ia ditujukan untuk memahami data yang terkumpul dari sumber untuk menjawab pertanyaan penulisan dengan kerangka berpikir tertentu. Analisis data dilakukan sejak pengumpulan data, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Data yang terkumpul diformulasikan sesuai ragam pengumpulan data.
2. Penulis dalam penelitian ini memulai dengan memahami prinsip-prinsip umum teks Al Qur'an sesuai teori pendidikan anak, dan teori tanggung jawab, terkait permasalahan, metode *masalah al mursalah* kemudian memformulasikannya dan merealisasikannya kedalam pandangan spesifik di masa sekarang dengan singronisasi dengan kaidah *fiqhiyah*, yaitu sehubungan dengan *maqasid syariah* mengenai perlindungan terhadap *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-aql* (menjaga akal).

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini rencananya akan disusun dalam enam bab yang terdiri dari :

Bab I, Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II, Kajian Pustaka, terdiri dari Kerangka Teori, dan Konseptual Penulisan

BAB III, Metode Penulisan, terdiri dari jenis penulisan, pendekatan penulisan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV, Fenomena Pelaksanaan Biaya Kesejahteraan Pendidikan Anak Pascaperceraian Orang Tua yang Terjadi di Masyarakat, terdiri dari kewajiban orang tua dalam mengasuh anak, naturalisasi hak anak dalam memperoleh pendidikan, dampak perceraian orang tua di masyarakat

BAB V, Identifikasi Penyebab Kelalaian Orang Tua Dalam Pelaksanaan Biaya Kesejahteraan Anak Pascaperceraian yang terjadi di Masyarakat, terdiri dari legalitas hukum pelaksanaan biaya kesejahteraan pendidikan anak pascaperceraian orang tua, identifikasi kelalaian pelaksanaan kesejahteraan pendidikan anak pascaperceraian orang tua yang terjadi di masyarakat

BAB VI, Pelaksanaan Biaya Kesejahteraan Pendidikan Anak Pascaperceraian Orang Tua Dalam Implementasi Kajian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 dan Hukum Islam, terdiri dari kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1979 dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian menurut kompilasi hukum islam.

BAB VII , Penutup, terdiri dari kesimpulan, dan saran.



## **BAB IV**

# **POBLEMATIKA PELAKSANAAN BIAYA KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN ANAK PASCA PERCERAIAN YANG TERRJADI DIMASYARAKAT**

### **A. Kewajiban Orang Tua Dalam Mengasuh Anak**

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pertumbuhan fisiknya. Peran seorang ayah yang berkewajiban dalam membiayai nafkah pemeliharaan dan pendidikan seorang anak agar si anak tersebut dapat menjadi seseorang yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara kelak, mengingat tanggung jawab anak sebagai generasi penerus.

Untuk kepentingan seorang anak, sikap perduli dari kedua orang tua terhadap tanggung jawab biaya nafkah memang sangat diperlukan. Jika tidak, maka bisa mengakibatkan seorang anak tumbuh, tidak terpelihara dan tidak terarah seperti yang diharapkan. Oleh sebab itu yang paling diharapkan adalah keterpaduan keduanya yang akan bisa diwujudkan selama kedua orang tuanya itu masih tetap dalam hubungan suami istri. Dalam suasana yang demikian, kendatipun tugas mengasuh anak lebih banyak dilakukan oleh pihak ibu, namun peranan seorang ayah tidak bisa diabaikan dalam hal memenuhi segala kebutuhan guna memperlancar tugas pengasuhan. Harapan seperti tersebut di atas tidak akan terwujud, bilamana terjadi perceraian antara ayah dan ibu si anak.

Peristiwa perceraian apapun alasannya merupakan malapetaka bagi anak, di saat itu si anak tidak lagi dapat merasakan nikmat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Padahal merasakan kasih sayang kedua orang tua merupakan unsur penting bagi pertumbuhan mental seorang anak. Pecahnya rumah tangga kedua orang tua, tidak jarang membawa kepada terlantarnya pengasuhan anak.

Putusnya perkawinan dikarenakan Perceraian dikarenakan adanya ketidak cocokkan lagi para pihak untuk melanjutkan rumah tangganya. Sehingga terjadinya pengajuan gugatan salah satu pihak baik itu suami maupun istri untuk diputuskannya perkawinan mereka. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan merupakan putusnya perkawinan berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh Hakim. Selain karena hal pengajuan gugatan perceraian tersebut diatas, putusnya perkawinan karena putusan pengadilan dilapangan juga dapat terjadi dikarenakan keadaan tidak hadir dari salah satu suami atau istri.

Putusnya suatu perkawinan bukan berarti melepaskan suatu beban tanggung jawab salah satu pihak istri atau suami terhadap pihak lainnya. ini dikarenakan, jika dibutuhkan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. Dengan mempertimbangkan bahwa pihak yang telah diceraikan tersebut tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi dirinya sendiri. Pengadilan Negeri akan mengadili perceraian masyarakat non muslim dengan menentukan jumlah nafkah tunjangan yang akan diberikan kepada salah satu pihak yang dinilai pantas untuk dinafkahi, dimana nafkah tersebut berasal dari harta kekayaan pihak suami atau istri yang dianggap mempunyai kelebihan atau kemampuan untuk itu.

Upaya melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada

anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut

Pentingnya pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang kondisi kerja yang lebih baik, kepuasan kerja, efisiensi konsumsi, kepuasan menikmati masa pensiun dan manfaat hidup yang lebih lama karena peningkatan gizi dan kesehatan. Sumber daya manusia yang berpendidikan juga akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Semakin banyak orang yang berpendidikan maka semakin mudah bagi suatu negara untuk membangun bangsanya. Hal ini dikarenakan telah dikuasainya keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi oleh sumber daya manusianya sehingga pemerintah lebih mudah dalam menggerakkan pembangunan nasional.

Ekonomi yang tidak memadai merupakan faktor pertama yang menjadi permasalahan dalam kebutuhan primer anak yakni, pendidikan, kesehatan, pangan, dan papan, dan pangan menjadi terkendala dalam pemenuhannya. Tidak dapat disangkal, sebagai orang tua tunggal, terutama bagi kaum wanita yang pasca perceraian menghidupi anak yang jumlahnya cukup banyak memberikan realita tidak dapat terpenuhinya keperluan primer anak.

Sedangkan sengketa hak pemeliharaan anak berbeda dengan sengketa harta, dalam sengketa harta putusan hakim bersifat menafikan hak milik pihak yang kalah, tetapi putusan hak pemeliharaan sama sekali tidak menafikan hubungan pihak yang kalah dengan anak yang disengketakan. Sehingga lazimnya walaupun putusan memenangkan pihak ibu dan mengalahkan pihak ayah, biasanya putusan juga menyatakan ayah tetap berkewajiban membelanjai kebutuhan anaknya dan ibu tidak boleh menghalanghalangi ayah berhubungan dengan anaknya demikian juga sebaliknya, meskipun orang tuanya sudah bercerai anak tetap bebas berhubungan dan mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Anak adalah titipan Allah SWT., kepada yang dikehendaknya. Merupakan tanggung jawab yang besar dalam mengemban amanah ini. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.,<sup>48</sup> kemudian dalam pasal 26 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak orang tua yang pada ayat 1 menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab melakukan , hal sebagai berikut:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi hak anak
2. Menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.<sup>49</sup>

Sudah sangat jelas undang-undang perlindungan anak sangat memperhatikan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan untuk tumbuh kembang anak yang sesuai dengan kemampuan dan bakat alaminya. Perlindungan ini juga tidak mengkhususkan kepada status apapun yang disandang anak, itu berarti pasal ini memuat untuk melindungi segenap anak Indonesia, baik yang dalam keluarga yang utuh, maupun yang sudah tidak memiliki keluarga yang utuh (akibat kematian orang tua atau perceraian orang tua).

Menurut Undang -Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menguraikan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Wingjosoebroto menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang seharusnya diakui sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat manusia, yang tiadanya hak ini serta merta akan menyebabkan manusia tidak mungkin dapat hidup harkat

---

<sup>48</sup>Tim, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, PDF.

<sup>49</sup>NM.Wahyu Kuncuro, SH., Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga, Raih Asa Sukses, Jakarta, tahun 2010, hal. 186.



dan martabatnya sebagai manusia.<sup>50</sup> Hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM, berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembangkan kewajiban yaitu melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*) hak-hak anak.<sup>51</sup>

Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 26 tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab keluarga dan Orang Tua juga menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara, mendidik dan melindungi anaknya. Sedangkan di dalam pasal 31 ayat 2 Bab VI tentang Kuasa Asuh dijelaskan bahwa apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga tidak dapat melaksanakan fungsinya maka kuasa asuh dapat dialihkan kepada lembaga yang berwenang. Pengasuhan oleh Lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial. Selain itu, masyarakat juga memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak baik dilakukan oleh perseorangan, lembaga sosial anak, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa.<sup>52</sup>

Nabi Muhammad SAW., memandang keluarga sebagai struktur yang kokoh dalam masyarakat. Beliau dalam riwayat yang sering kita ketahui memberikan teladan mulia dalam hal membina keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dikehidupan beliau. Hal ini juga dianjurkan oleh beliau kepada seluruh pengikut ajarannya untuk mengayomi keluarga.<sup>53</sup>

Di dalam ajaran Islam, anak yang lahir ke dunia ini memiliki hak-hak dan kewajiban tertentu yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya sebagai pelaksana tanggung jawab mereka kepada Allah dan untuk kelestarian keturunan. Para ulama menghitung ada banyak hak yang

---

<sup>50</sup>Meuthia G. Rochman, at. Al., Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan, Jakarta: ELSAM, 1997, hal. ix.

<sup>51</sup>Keputusan Menteri sosial, Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak, Menteri Sosial, 2010, hal. 11.

<sup>52</sup>Fuadi, "Pemenuhan Hak Anak Oleh Pengelola Panti Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan studi kasus Banda Aceh", Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pasca Sarjana Syiah Kuala, No. 1, Agustus, 2013, hal. 2.

<sup>53</sup>Husai'in Ali Turkamani, M.S Nasrulloh dan Ahsin M. (Perj), *Bimbingan Keluarga....*, hal. 37.

dimiliki anak atau ada banyak kewajiban orang tua terhadap anaknya, diantara yang terpenting adalah sebagai berikut.

1. Memberikan nama yang baik secara bahasa dan maknanya. Syaikh Jamal Abdurrahman dalam buku terjemah *Islamic Parenting* mengutip dari buku *Tuhfatul Maudud* mengenai pemberian nama, yaitu ketika Haliamah As-Sa'diyah berhenti dihadapan Abdul Muthalib berkata, “siapa anda?”, Halimah menjawab, “Seorang wanita dari Bani Sa’ad”, Abdul Muthalib berkata, “siapa namamu?” ia menjawab, “Halimah”, Abdul Muthalib berkata, “ wah hebat, bahagia dan lembut, dua sifat ini merupakan kekayaan sepanjang masa.”<sup>54</sup>
2. Memberikan ASI Eksklusif dan memilihkan perempuan penyusu bayi yang shalihah untuk anak, apabila ibunya sudah tidak ada. Masa penyusuan yang paling utama adalah dua tahun penuh. Berdasarkan firman Allah swt:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” (Al-Baqarah[2]: 233)<sup>55</sup>

Banyak penelitian ilmiah dan penelitian medis yang membuktikan bahwa masa dua tahun pertama sangat penting bagi pertumbuhan anak secara alami dan sehat, baik dari sisi kesehatan maupun kejiwaan. Ibnu sina, seorang dokter kenamaan, menegaskan urgensi penyusuan alami dalam pernyataannya,” bahwasanya seorang bayi sebisa mungkin harus menyusu dari air susu ibunya. Sebab, dalam tindakannya mengulum puting susu ibu terkandung manfaat sangat besar dalam menolak segala sesuatu yang rentan membahayakan dirinya.

---

<sup>54</sup>Jamal Abdurrahman, Terj. Agus Suwandi, *Islamic Parenting (Athfâlul muslimîn kaifa rabâhumun nabiyyul amin shollallahu ‘alayhi wa sallam)*, Solo; PT Awam Media Profetika, 2012, hal. 55.

<sup>55</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an Tajwid....*, hal. 37.

3. Hendaknya ibu mengasuh anaknya khusus pada masa buaian dan masa awal anak-anak. Jangan sampai ibu menyerahkan anak kepada pembantu dan pengasuh. Sebab, dalam aktivitas menyusui, selain ibu menyusukan air susu kepada anak, ia juga memberikan cinta dan kasih sayang yang tidak dimiliki oleh orang lain. Berdasarkan hal inilah dapat dipahami hikmah Allah ketika Dia mengembalikan nabi Musa as., kepada ibunya agar sang ibu menjadi tenang dan tidak bersedih. Allah swt berfirman,

فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Maka Kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.” (QS. al Qashas [28]:13)<sup>56</sup>

4. Orang tua mengajarkan kitab Allah serta ilmu agama dan dunia yang wajib dikuasainya. Syaikh Jamal Abdurrahman dalam bukunya “Islamic Parenting“ mengutip sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnadnya* no. 556 (*sanadnya shahih*).

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلَامًا رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَسْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

---

<sup>56</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an Tajwid*..., hal. 386.

Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq berkata; telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Laits dari Thawus dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "hendaklah kalian Mengajar (anak-anak kalian)., mempermudah dan jangan mempersulit. Bila engkau marah maka diamlah. Dan Bila engkau marah maka diamlah. Bila engkau marah maka diamlah." (HR. Ahmad Nomor 2425)<sup>57</sup>

Kaum muslimin generasi awal memahami betul urgensi pengajaran Alquran, maka mereka berlomba dan bersaing dalam aktivitas ini.

5. Memberi keluarga (anak dan isteri) dengan uang yang halal. Hal ini ditegaskan dalam Firman Allah

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

Artinya: Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan. Sesungguhnya, aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q,S, Al Mu'minin [23]: 51)<sup>58</sup>

Makanan yang diberikan kepada anak -anak hendaknya Makanan yang halal. jika anak telah dibiasakan untuk mengkonsumsi makanan yang halal, mencari penghasilan yang halal dan membelanjakan kepada yang halal, maka ia tumbuh sehat dalam sikap sederhana, terjauh dari sikap boros dan pelit. Karena apapun yang menjadi makanan dan minuman kan menjadi darah dan daging.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١٧٢) يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١٧٢)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah

---

<sup>57</sup>Jamal Abdurrahman, Terj. Agus Suwandi, *Islamic Parenting ...*, 2012, hal. xv (mukadimah).

<sup>58</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an Tajwid....*, hal. 346.

kepada-Nya.. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, (daging) babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi Barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. al Baqarah [2]: 172-173)<sup>59</sup>

6. Mengajarkan anak sholat dan membiasakan untuk mengerjakannya.  
Berdasarkan firman Allah swt,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا تَحْنُ نَزِرُكَ ۖ وَالْعَقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ  
(طه: ١٣٢)

Artinya: “Dan perintahkanlah kepada keluargamu melaksanakan shalat dan bersabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik di akhirat) adalah bagi orang yang bertaqwa.” (QS. al Thâhâ [20]:132)<sup>60</sup>

Senada dengan kalam Ilahi di atas, dalam hadis Rasulullah bersabda:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاصْرِفْهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya: "Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan shalat saat usia mereka tujuh tahun, dan pukullah mereka saat usia sepuluh tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka." (Dishahihkan oleh Al-Albany dalam *Irwa'u Ghalil*, no. 247)<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an Tajwid*...., hal. 27.

<sup>60</sup>*Ibid.*, hal. 322.

<sup>61</sup>Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Terj. Ahmad Zainuddin, dan Zaenal Mubarak, *Bekal Menyambut Buah Hati (Tuhfatul Maulud bi Ahkami al-Maulud)*, Jakarta: Ummul Qura, 2014, hal. 337.

Betapa pentingnya membiasakan anak dalam melakukan sholat lima waktu memberikan dampak positif untuk kehidupannya dimasa depan. Peran oran tua yang memberi tauladan dan pengarahan yang baik mengenai sholat memberikan pondasi yang kuat dalam memberikan pengetahuan mengenai tauhid dan ibadah, dengan pembiasaan ini kelak saat memasuki tahap usia remaja, anak sudah mandiri dan peduli sholat tanpa diingatkan lagi.

7. Mengarahkan teman pergaulan yang baik bagi anak-anak. Sebab, seorang teman dan lingkungan laksana mesin penarik, dan seorang sahabat cenderung meneladani sahabatnya. Islam sendiri telah menganjurkan agar berteman dengan orang-orang shalih dan baik, serta memperingatkan untuk tidak berteman dengan orang-orang yang buruk akhlaknya.

Memilihkan teman yang baik untuk anak berguna melindungi dari terjatuh ke dalam penyimpangan dan menjauhkan dirinya dari jalan licin keburukan serta lubang lubang kenistaan.<sup>62</sup>

Peran orang tua dalam mengarahkan anaknya untuk bergaul dengan teman yang baik akhlak dan budinya bukan berarti tidak membebaskan anak untuk bergaul dengan kalangan terbatas. Ketegasan ini sebenarnya untuk kebaikan anak tersebut, karena teman merupakan aktor eksternal dalam pembentukan karakter dan cara pandang hidup, jika salah dalam memilih teman, maka usia anak yang masih mencari jati diri, dengan mudah akan terjerumus kedalam lingkungan yang merusak aqidah dan akhlak. Inilah hal kecil yang bisa berdampak besar jika tidak diarahkan dengan baik.

8. Memberi nafkah kepada anak hingga usia dewasa. Sangat jelas manfaat pendidikan yang terkandung dalam tindakan memberi nafkah, sebab ini berarti mempersiapkan anak dengan baik untuk mermfokuskan diri dengan pendidikan pada usia dini.

---

<sup>62</sup> Andika Mianoki, <http://muslim.or.id/akhlaq-dan-nasehat/pengaruh-teman-bergaul.html>, diunduh 24 Mei 2018, Pukul. 22.27 WIB.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُرُ  
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَأْثَرَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق: ٧)

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang berikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.(QS. At Thalâq [65]:7)<sup>63</sup>

Sudah tidak asing lagi dewasa ini, kita melihat fenomena anak dibawah umur bekerja untuk membantu perekonomian keluarga dan tidak bersekolah. Kebutuhan yang saling mendesak, sedangkan pendapatan kurang dari cukup, memaksa anak-anak yang tidak seharusnya bekerja, ikut mengambil alih dalam memulihkan perekonomian keluarga sehingga tidak melanjutkan jenjang pendidikannya. Inilah yang disoroti oleh dalil QS. At Thalâq [65]:7, mampu atau tidaknya dalam memberikan nafkah kepada anak-anak seharusnya tidak merusak masa depan, terutama kurangnya pendidikan. Mencari nafkah untuk keluarga bukanlah suatu beban. Allah SWT., tidak pernah ingkar dengan janjiNya, melalui usaha dan doa maka rejeki akan berdatangan dari jalan yang tidak bisa diduga-duga, hal ini sejalan dengan kutipan terjemahan ini, “....Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang berikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.(QS. at Thalâq [65]:7).<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an Tajwid*...., hal. 560.

<sup>64</sup>*Ibid.*, hal. 559.

9. Memberikan pengajaran mengenai ilmu dunia dan agama merupakan kewajiban orang. Setiap orang tua adalah pemimpin bagi keluarganya, dan setiap pemimpin kan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya.<sup>65</sup> Allah Ta'ala juga berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم: ٦)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.(QS. at Tahrîm [66]:6)<sup>66</sup>

10. Pada usia dewasa (siap menikah) kedua orang tua berhak mencari istri yang shalihah bagi anak laki-laknya dan suami yang shalih bagi anak perempuannya, kemudian membiayai acara pernikahan anak jika keduanya bercukupan.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ؕ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ؕ وَاللَّهُ  
وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿النور: ٣٢﴾

Artinya :”Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. an Nûr [24]:32)<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Andika Mianoki, <http://muslim.or.id/akhlaq-dan-nasehat/pengaruh-teman-bergaul.html>, diunduh 24 Mei 2015, Pukul. 22.30 WIB.

<sup>66</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an Tajwid*..., hal. 560.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hal. 355.



## B. Naturalisasi Hak Anak Dalam Memperoleh Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat krusial, hingga dalam dalil Al Qur'an dan Al Hadis tidak luput membahasnya yakni sebagai berikut:

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Artinya: “Kamu sekalian adalah pemimpin, dan kamu sekalian bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Seorang Amir (raja) adalah pemimpin, seorang suami pun pemimpin atas keluarganya, dan isteri juga pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya”. (HR.Muslim)<sup>68</sup>

Juga sabda beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam,

إِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَزَعَاهُ أَحْفَظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَّعَ حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ.

Artinya: “Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang apa yang dipimpinnya. Apakah ia pelihara ataukah ia sia-siakan, hingga seseorang ditanya tentang keluarganya.”<sup>69</sup>

Seorang suami harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi suami yang shalih, dengan mengkaji ilmu-ilmu agama, memahaminya serta mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah ‘Azza wa Jalla dan Rasul-Nya, serta menjauhkan diri dari setiap yang dilarang oleh Allah ‘Azza wa Jalla dan Rasul-Nya. Kemudian dia

---

<sup>68</sup>Hadits Shahih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 893, 5188, 5200), Muslim (no. 1829), Ahmad (II/5, 54, 111) dari Ibnu ‘Umar radhi-yallaahu ‘anhuma. Lafazh ini milik al-Bukhari. Lihat Rachmat Syafe’i, *Al-Hadis: Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum*, Pustaka Setia:Bandung, 2000, hal. 135.

<sup>69</sup>Hadits Shahih: Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam ‘Isyratun Nisaa’ (no. 292) dan Ibnu Hibban (no. 1562) dari Shahabat Anas bin Malik radhiyallaahu ‘anh. Al-Hafizh Ibnu Hajar menshahihkan hadits ini dalam Fat-hul Baari (XIII/113), lihat Silsilah ash-Shahiihah (no. 1636). Lihat Rachmat Syafe’i, *Al-Hadis: Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum*, Pustaka Setia: Bandung, 2000, hal. 135.

mengajak dan membimbing sang isteri untuk berbuat demikian juga, sehingga anak-anaknya akan meneladani kedua orang tuanya karena tabiat anak memang cenderung untuk meniru apa-apa yang ada di sekitarnya.

Mendidik anak dengan cara-cara yang baik dan sabar agar mereka mengenal dan mencintai Allah, yang menciptakannya dan seluruh alam semesta, mengenal dan mencintai Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam, yang pada diri beliau terdapat suri tauladan yang mulia, serta agar mereka mengenal dan memahami Islam untuk diamalkan. Menurut Ibnu Manzhur, ma’ruf adalah ism jâmi’ bagi setiap hal yang dikenal, baik itu berupa keta’atan kepada Allah, bertaqarrub kepada-Nya, dan berbuat baik sesama manusia, dan juga termasuk setiap hal-hal baik yang dianjurkan agama untuk melakukannya dan menjauhkan diri dari hal-hal buruk. Ajarkanlah Tauhid, yaitu bagaimana mentauhidkan Allah, dan jauhkan serta laranglah anak dari berbuat syirik. Sebagaimanan nasihat Luqman kepada anaknya,

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia memberi pelajaran kepadanya, ‘Wahai anakku! Janganlah engkau memperskutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar.’ [Luqman: 13].

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya: “Barangsiapa yang menghendaki kebaikan di dunia maka dengan ilmu. Barangsiapa yang menghendaki kebaikan di akhirat maka dengan ilmu. Barangsiapa yang menghendaki keduanya maka dengan ilmu” (HR. Bukhori dan Muslim).<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup>Rosyid Nur Eka Putra, yang di unduh di website <http://rosyidnureka.blogspot.com/2013/09/kumpulan-hadist-mengenai-pendidikan.html>, pada tanggal 13 Juli 2018 pada pukul 10.33 WIB.

Anak merupakan pribadi sosial yang memerlukan relasi dan komunikasi dengan orang lain untuk memanusiakan dirinya. Anak ingin dicintai, dihargai dan diakui. Berkeinginan pula untuk dihitung dan mendapat tempat dalam kelompoknya. Hanya dengan relasi dan komunikasi dengan orang lain, misalnya dengan orang tua, pendidik, teman sebaya dan lain-lain, anak dapat berkembang menuju kedewasaan. Hubungan anak dengan orang tua maupun orang dewasa lainnya merupakan hubungan yang mempengaruhi. Dengan kata lain, individu sosial dengan tingkah laku sosial itu selalu dikomunikasikan dengan manusia lain.<sup>71</sup>

Tumbuh kembang anak merupakan periode penting yang menjadi perhatian khusus orang tua. Asupan gizi yang seimbang dan stimulus latihan gerak menjadi penentu stabilnya tumbuh kembang anak. Adanya kesibukkan pekerjaan menjadi alasan utama diabaikannya perhatian terhadap fase ini. Kasih sayang berupa perhatian dan sentuhan orang tua merupakan peran penting menumbuhkan emosional yang sehat di jiwa anak, sehingga jalinan batin antara orang tua dan anak berdampak kepada komunikasi yang efektif.

Anak bukan merupakan orang dewasa dalam bentuk kecil, karena ia mempunyai sifat berlainan dari orang dewasa. Ia harus tumbuh dan berkembang sampai dewasa agar dapat berguna bagi masyarakat. Walaupun pertumbuhan dan perkembangan berjalan menurut norma-norma tertentu, seorang anak dalam banyak hal bergantung kepada orang dewasa, misalnya mengenai makan, perawatan, bimbingan, perasaan aman, pencegahan penyakit dan sebagainya. Oleh karena itu semua orang yang mendapat tugas mengawasi anak harus mengerti persoalan anak yang sedang tumbuh dan berkembang, misalnya keperluan dan lingkungan anak pada waktu tertentu agar anak dapat tumbuh dan berkembang sebaik-baiknya.

---

<sup>71</sup>Dra. Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Yogyakarta: Rajawali Press, 2011, hal. 43.

Sebuah organ yang tumbuh berarti organ itu akan menjadi besar, karena sel-sel dan jaringan di antara sel bertambah banyak. Selama pembiakan, sel berkembang menjadi sebuah alat (organ) dengan fungsi tertentu. Pada permulaannya, organ ini masih sederhana dan fungsinya belum sempurna. Lambat laun organ tersebut dengan fungsinya akan tumbuh dan berkembang menjadi organ yang matang, seperti yang diperlukan orang dewasa. Dengan demikian pertumbuhan, perkembangan dan kematangan tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain.<sup>72</sup>

Untuk perkembangan yang normal diperlukan pertumbuhan yang selalu bersamaan dengan kematangan fungsi. Untuk pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimum diperlukan berbagai faktor misalnya makanan harus disesuaikan dengan keperluan anak yang sedang tumbuh. Penyakit infeksi akut maupun kronis menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga pencegahan penyakit menular merupakan hal yang penting, disamping diperlukan bimbingan, pembinaan, perasaan aman dan kasih sayang dari ayah dan ibu yang hidup rukun, bahagia dan sejahtera dalam lingkungan yang sehat.

Sebelum bayi lahir terdapat pertumbuhan dan perkembangan yang cepat sekali, yaitu dari seorang makhluk yang terdiri hanya dari satu sel sampai terjadi seorang bayi yang setelah dilahirkan dapat hidup sendiri terpisah dari ibunya. Triwulan pertama masa embrio sangat penting, karena merupakan masa pembentukan organ dan beberapa organ telah mulai bekerja. Bila dalam masa ini pertumbuhan embrio dipengaruhi oleh obat, penyakit virus atau radiasi, maka akan terjadi perubahan pada organ yang sedang tumbuh tersebut yang selanjutnya akan menyebabkan kelainan bawaan.<sup>73</sup>

Ketidaksinkronan antara asupan gizi dan bimbingan kecerdasan emosional dari orang tua sering kali menjadi penghambat tumbuh kembang anak secara psikis. Perlu diperhatikan bahwa anak dan tumbuh

---

<sup>72</sup>I Dewa Putu, <http://www.pantirapih.or.id/index.php/artikel/kesehatan-ibu-dan-anak/199-pertumbuhan-dan-perkembangan-anak>, diunduh 25 Mei 2018, Pukul 00.03 WIB.

<sup>73</sup>I Dewa Putu, <http://www.pantirapih.or.id/index.php/artikel/kesehatan-ibu-dan-anak/199-pertumbuhan-dan-perkembangan-anak>, diunduh 25 Mei 2018, Pukul 00.03 WIB.

kembangkannya tidak hanya berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi. Keseimbangan kecerdasan emotional baik secara psikologis, moral, dan spiritual menjadi penentu dewasa pada tingkat usia yang seharusnya.

Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang disahkan tahun 1990 kemudian diserap ke dalam Undang-Undang no 23 tahun 2002. Berdasarkan sesuatu yang melekat pada diri anak tersebut yaitu hak yang harus dilindungi dan dijaga agar berkembang secara wajar.

Terdapat empat prinsip utama yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, prinsip-prinsip ini adalah yang kemudian diserap ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang disebutkan secara ringkas pada pasal 2. Secara lebih rinci Prinsip-prinsip tersebut adalah:<sup>74</sup>

### **1. Prinsip Non Diskriminasi**

Merupakan hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam pasal 2 Konvensi Hak Anak, yakni

Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah”. (Ayat 1). “Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga”. (Ayat 2).

---

<sup>74</sup>Supriyadi W. Eddyono, Pengantar Konvensi Hak Anak, Jakarta: ELSAM, 2005, hal. 2.

**2. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*)**

Merupakan semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1).

**3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*)**

Merupakan negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2).

**4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*)**

Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yaitu: Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak

Penegasan hak anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 ini merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dari KHA dan norma hukum nasional. Dengan demikian, Pasal 4 s/d 19 UU No. 23 tahun 2002 menciptakan norma hukum (legal norm) tentang apa yang menjadi

hak-hak anak. Hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar.<sup>75</sup>

Pada pasal 4 disebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dapat dikatakan, Pasal 4 ini merupakan *primary laws* (norma hukum utama), yang menjadi inspirasi bagi norma hukum dalam pasal lainnya, yang secara teoritis dapat disebut sebagai *secondary laws*. Karenanya, Hak hidup sebagai hak yang tidak dapat diabaikan dalam keadaan apapun, termasuk situasi darurat (*emergency*).<sup>76</sup>

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 diatur mengenai hak dan kewajiban anak yang tercantum dalam Pasal 4 s/d pasal 19. Secara lebih perinci hak-hak anak dalam UU Nomor 23 tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Sejalan dengan KHA, hak hidup bagi anak ini, dalam wacana instrumen/konvensi internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama (*supreme right*). Sedangkan hak atas tumbuh kembang diturunkan ke dalam hak atas kesehatan, pendidikan, dan hak untuk berekspresi, dan memperoleh informasi. Dalam UU No. 23/2002, turunan hak atas tumbuh kembang ini diwujudkan dalam penyelenggaraan perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, termasuk agama.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup>Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, Jakarta: KPAI, t.t., hal. 11.

<sup>76</sup>Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga...*, hal. 11.

<sup>77</sup>Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga...*, hal. 12.

- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. (Pasal 6). Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi merupakan wujud dari jaminan dan penghormatan negaraterhadap hak anak untuk berkembang, yang mengacu kepada Pasal 14 KHA.
- d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7). Dalam pasal ini dijelaskan bahwa jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak tersebut berhak untuk diasuh oleh orang lain sebagai anak asuh atau anak angkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat 2 dan 3).
- e. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8). Hak memperoleh pelayanan kesehatan ini merupakan hak terpenting dalam kelompok hak atas tumbuh kembang anak. Setidaknya, hak atas pelayanan kesehatan bagi anak dirujuk ke dalam Pasal 24 dan 25 KHA. Mengenai bagaimana pelaksanaan hak-hak kesehatan ini, selanjutnya dirumuskan dalam ketentuan tentang penyelenggaraan hak anak dalam bidang kesehatan yang diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 47 UU No.23/2002. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan (pasal 44).<sup>78</sup>
- f. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9). Hak anak atas pendidikan meliputi hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri anak sesuai dengan bakat, minat, dan

---

<sup>78</sup>Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak...*, hal. 13.



kecerdasannya. Hak ini merupakan turunan dan pelaksanaan dari Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Bahkan, Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 secara eksplisit memprioritaskan pendidikan dengan alokasi anggaran dalam APBN serta dari APBD sebesar minimal 20 persen.<sup>79</sup>

- g. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2).
- h. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
- i. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
- j. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).<sup>80</sup>
- k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang menyimpang (Pasal 13), perlakuan-perlakuan yang menyimpang itu adalah:
  - 1) Diskriminasi.
  - 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
  - 3) Penelantaran.
  - 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
  - 5) Ketidakadilan.
  - 6) Perlakuan salah lainnya

---

<sup>79</sup>Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak...*, hal. 14.

<sup>80</sup>*Ibid.*, hal. 14.

- l. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14). Pada prinsipnya, negara melakukan upaya agar anak berada dalam pengasuhan orangtuanya sendiri, dan tidak dipisahkan dari orangtua secara bertentangan dengan keinginan anak. Pada pasal ini ditegaskan bahwa anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya secara bertentangan dengan kehendak anak, kecuali apabila pemisahan dimaksud mempunyai alasan hukum yang sah, dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak<sup>81</sup>
- m. Hak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam situasi darurat atas kerusuhan (pasal 15), hal itu adalah:
  - 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
  - 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
  - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
  - 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
  - 5) Pelibatan dalam peperangan
- n. Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan perlindungan dari penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).<sup>82</sup>
- o. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
  - 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
  - 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku

---

<sup>81</sup>Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak...*, hal. 15.

<sup>82</sup>Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak...*, hal. 16.

- 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat 1).
- p. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2).
- q. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Dengan adanya berbagai peristiwa pada belakangan ini maka pemerintah melakukan beberapa perubahan pada undang-undang nomor 23 tahun 2002 dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 35 tahun 2014 yang merubah dan menambahi beberapa poin di dalam pasal-pasal undang-undang nomor 23 tahun 2002, perubahan-perubahan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban anak tersebut adalah:<sup>83</sup>

- a. Pada pasal 6 dirubah sehingga berbunyi “Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali”.
- b. Pada pasal 9 ayat 1 ditambah dengan ayat 1 (a) yang berbunyi “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.
- c. Pada pasal 9 ayat 2 dan pasal 12 terdapat perubahan kalimat “anak yang menyandang cacat” diganti dengan “anak peyandang disabilitas”.
- d. Pada pasal 14 ditambah dengan ayat 2 yang berbunyi “Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

---

<sup>83</sup>Tim Penyusun, *Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002*, PDF.

- 1) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
  - 2) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - 3) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
  - 4) Memperoleh Hak Anak lainnya.
- e. Pada pasal 15 terkait dengan hak anak mendapat perlindungan ditambah dengan poin f yaitu “kejahatan seksual”.

Setiap hak yang didapatkan berimbang dengan kewajiban yang harus dijalankan, selain memiliki beberapa hak, seorang anak juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kehidupannya. Dalam pasal 19 UU NO. 23 Tahun 2002 diuraikan bahwa setiap anak memiliki kewajiban untuk;<sup>84</sup>

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Secara garis besar hak-hak anak yang dapat dikategorikan menjadi empat kategori yaitu sebagai berikut:

- a. Hak kelangsungan hidup yang mencakup hak dan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai (*survival rights*).
- b. Hak tumbuh kembang anak yang mencakup semua jenis pendidikan formal maupun informal dan hak menikmati standart kehidupan yang layak bagi tumbuh kembang fisik, mental, spritual, moral non moral dan sosial (*development rights*).
- c. Hak perlindungan yang mencakup perlindungan diskriminasi, penyalahgunaan dan penelantaran, perlindungan anak-anak tanpa

---

<sup>84</sup>Muhamma Joni, *Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, KPAI: Jakarta, hal. 16.

keluarga dan perlindungan bagi anak-anak pengungsi (protection rights).

- d. Hak partisipasi yang meliputi hak-hak anak untuk menyampaikan pendapat/pandangannya dalam semua hal yang menyangkut nasib anak itu (*participation rights*).<sup>85</sup>

### C. Dampak Perceraian Orang Tua yang Dirasakan Anak

Pengasuhan anak mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua.<sup>86</sup> Selanjutnya, tanggung jawab pengasuhan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu atau terus menerus sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal dapat dikategorikan orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri. Disamping itu juga, pendidikan dalam hal ini dimaksudkan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut.<sup>87</sup>

Di dalam jurnal hukum yang berjudul “*Jurnal Juvenile Delinquency (Kenakalan Remaja) Pada Remaja Putra Korban Perceraian Orang Tua*” yang ditulis oleh Sujji Prihatinningsih menyebutkan bahwa Perceraian pasangan suami-istri seringkali berakhir menyakitkan bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk di dalamnya adalah anak-anak. Peristiwa ini menimbulkan anak-anak tidak merasa mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari orang tuanya. Perceraian juga dapat menimbulkan stres dan trauma untuk memulai hubungan baru dengan lawan jenis. Perceraian adalah penyebab stres kedua paling tinggi, setelah kematian pasangan

---

<sup>85</sup>Muhamma Joni, *Hak-Hak Anak...*, hal. 6.

<sup>86</sup>Aminur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1 /1974 sampai KHI*, Cet. 3, Kencana: Jakarta, 2006, hal. 296

<sup>87</sup>*Ibid.*, hal. 293.

hidup. Seringkali perceraian diartikan sebagai kegagalan yang dialami suatu keluarga.

Adapun alasan perceraian telah diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni dengan alasan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain, salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.<sup>88</sup>

Menurut data yang di terbitkan koran Tabengan pada tanggal 20 Maret 2017, kasus perceraian tahun 2016 yang terjadi di Kalimantan Tengah dan tercatat di Pengadilan Tinggi Agama dari 6 wilayah yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Pangkalan Bun, Kabupaten Muara Teweh, Kabupaten Buntok, Kabupaten Kuala Kapuas dan Kabupaten Sampit, sebanyak 659 cerai talak atau pihak suami yang meminta perceraian dan 2.129 cerai gugat perceraian yang diminta oleh istri. Berdasarkan daerahnya, tahun 2016 kasus perceraian tercatat Kota Palangka Raya sebanyak 463 kasus, **Pangkalan Bun sebanyak 721**, Muara Teweh sebanyak 249, Buntok sebanyak 165, Kuala Kapuas sebanyak 433 dan Sampit sebanyak 757 hingga untuk Tahun 2016 tercatat sebanyak 2.788 kasus baik cerai talak maupun cerai gugat. Untuk Tahun 2017 selama 2

---

<sup>88</sup>Diunduh di website <https://gaya.tempo.co/read/472668/6-dasar-terjadinya-perceraian-menurut-uu-pernikahan>, pada tanggal 20 Maret 2018.

bulan terakhir, tercatat telah terjadi sebanyak 632 kasus perceraian yang tercatat di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.<sup>89</sup>

Berdasarkan data rekapitulasi perkara tahun 2017 di Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tahun 2017, diterima 824 perkara perceraian dengan jumlah perkara cerai talak sebanyak 221, dan jumlah perkara cerai gugat 603 perkara. Jumlah perkara perceraian yang diputus pada tahun 2017 ditambah dengan sisa perkara tahun 2016 dengan jumlah 106 perkara dan jumlah perkara cerai talak sebanyak 27, dan jumlah perkara cerai gugat 79 perkara, sehingga total keseluruhan perkara perceraian yang diputus pada tahun 2017 ialah **930 perkara**.<sup>90</sup>

Dengan banyaknya angka perceraian di Kalimantan Tengah, salah satunya yang menjadi perhatian peneliti ialah kasus perceraian di Kabupaten Kotawaringin Barat yakni Kota Pangkalan Bun, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau (berasa dalam wilayah Pengadilan yang sama yakni Pengadilan Agama Kelas 1 B Pangkalan Bun) tentunya ada banyak anak yang menjadi korban dalam perpisahan orang tuanya. Kondisi yang menjadi perhatian peneliti terjadi mengenai akibat perceraian orang tua dalam usia anak dibawah usia 21 tahun (usia belum bisa mandiri)<sup>91</sup> agar tetap terjamin pertumbuhan jasmani, kecerdasan rohani, dan pendidikannya.<sup>92</sup>

Khusus yang beragama Islam, ada tambahan dua alasan perceraian selain alasan-alasan di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yakni suami melanggar taklik talak, dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>93</sup>

---

<sup>89</sup>Udi, Koran Tabengan, diunduh di website <https://www.tabengan.com/bacaberita/102/2-608-istri-gugat-cerai-suami/>, tanggal 05 April 2018.

<sup>90</sup>Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Tahun 2017, hal. 76.

<sup>91</sup>Kompilasi Hukum Islam, *Bab XIV Pemeliharaan Anak Pasal 98 bagian No.1*, Bandung, Fukusind Mandiri, 2013, hal.40

<sup>92</sup>Kompilasi Hukum Islam, *Bab Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 77 bagian No.3...*, hal. 33.

<sup>93</sup>Boris Tampubolon, S.H, diunduh di website <https://konsultanhukum.web.id/alasan-alasan-perceraian-menurut-hukum/>.

Perceraian adalah peristiwa yang traumatis bagi semua pihak yang terlibat bagi pasangan yang tak lagi dapat hidup bersama dan juga bagi anak-anak, mertua/ipar, sahabat,serta teman Cole . Sedangkan, menurut Yusuf , perceraian orang tua adalah keadaan keluarga yang tidak harmonis, tidak stabil atau berantakan. Menurut Save, Perceraian dalam keluarga manapun merupakan peralihan besar dan penyesuaian utama bagi anak-anak akan mengalami reaksi emosi dan perilaku karena “kehilangan” satu orang tua. Bagaimana anak bereaksi terhadap perceraian orang tuanya sangat dipengaruhi oleh cara orang tua berperilaku sebelum, selama dan sesudah perpisahan.<sup>94</sup>

Anak yang mengalami perceraian orang tua di mana ayah dan ibunya tidak dapat berperan dan berfungsi sebagai orang tua yang sebenarnya. Tidak dapat dipungkiri kebutuhan ekonomi yang semakin sulit membuat setiap orang bekerja semakin keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Namun orang tua seringkali tidak menyadari kebutuhan psikologis anak yang sama pentingnya dengan memenuhi kebutuhan hidup. Anak membutuhkan kasih sayang berupa perhatian, sentuhan, teguran dan arahan dari ayah dan ibunya, bukan hanya dari pengasuhnya atau pun dari nenek kakeknya.<sup>95</sup>

#### **D. Pelaksanaan Biaya Pendidikan Anak Pascaperceraian Orang Tua di Masyarakat**

Diperkirakan 80% problema hukum keluarga terbesar adalah tentang hukum perceraian. Dan pada kenyataannya di Pengadilan Agama setiap hari menerima setumpuk gugatan perceraian. Budaya Timur kita seharusnya men-sakral-kan arti sebuah perkawinan, tapi fakta berkata lain. Setiap tahun grafik perkara perceraian terus meningkat dan tentunya anaklah yang menjadi korban dalam perceraian. Tidak bukan adalah anak-anaknya mereka sendiri.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup>Di unduh di website <http://publication.gunadarma.ac.id/bitstream/123456789/1059/1/10504177.pdf>, pada tanggal 13 Juli 2018, Pukul 10.20 WIB.

<sup>95</sup>*Ibid.*

<sup>96</sup>Latief S.H., LLM, diunduh di <https://masalahperceraian.com/>, tanggal 05 April 2018.



Akibat perceraian, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Sebagai ibu atau bapak mereka tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak dan jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi putusan dengan semata-mata mendasarkan kepada kepentingan anak.

Seorang bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan jika bapak ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikulnya.<sup>97</sup> Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orang tua putus.<sup>98</sup>

Perceraian rumah tangga berpengaruh buruk pada perkembangan mental atau jiwa anak, terutama anak yang masih berada di bawah umur. Akibat dari perceraian kedua orang tuanya, maka kehidupan anak dalam keluarga tidak berjalan normal yakni tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya selayaknya sebuah keluarga yang utuh. Demikian juga di lingkungan pergaulannya, seorang anak yang orang tuanya telah bercerai akan timbul rasa iri melihat teman-temannya yang hidup bahagia, karena selalu membandingkan dengan hidupnya yang kelam. Selain itu, pengaruh besar dampak perceraian pada anak akan mengalami rasa traumatik melihat orang tuanya tidak bersama lagi.

Fenomena pascaperceraian orang tua yang terjadi dimasyarakat, anak menjadi korban yang berdampak langsung dengan berkurangnya hak primer dan sekunder. Hal ini dilatar belakangi dengan terbaginya perhatian orang tua dengan masalah pribadi, penyesuaian suasana baru baik dalam hal lingkungan, pekerjaan pasangan, dan kebutuhan anak. Tanggung jawab memelihara dan mendidik anak yang selama ini bersama sekarang menjadi tanggung jawab orang tua tunggal. Hal ini juga diperparah dengan adanya pernikahan baru yang terjadi antara orang tua yang bercerai tersebut, sehingga dianggap tanggung jawab pemeliharaan anak telah berpindah kepada pasangan yang baru.

---

<sup>97</sup>Pasal 41 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PDF.

<sup>98</sup>Pasal 45 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PDF.

Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya atas apapun status yang telah disetujui keduanya (dalam ikatan pernikahan atau bercerai), semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Selagi anak belum berusia 18 tahun atau belum menikah ia berada di bawah kekuasaan orang tuanya yang akan mewakilinya mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.<sup>99</sup> Meskipun memegang kuasa, orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya kecuali kepentingan anak menghendaki.<sup>100</sup>

Menurut data yang di terbitkan koran Tabengan pada tanggal 20 Maret 2017, kasus perceraian tahun 2016 yang terjadi di Kalimantan Tengah dan tercatat di Pengadilan Tinggi Agama dari 6 wilayah yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Pangkalan Bun, Kabupaten Muara Teweh, Kabupaten Buntok, Kabupaten Kuala Kapuas dan Kabupaten Sampit, sebanyak 659 cerai talak atau pihak suami yang meminta perceraian dan 2.129 cerai gugat perceraian yang diminta oleh istri. Berdasarkan daerahnya, tahun 2016 kasus perceraian tercatat Kota Palangka Raya sebanyak 463 kasus, **Pangkalan Bun sebanyak 721**, Muara Teweh sebanyak 249, Buntok sebanyak 165, Kuala Kapuas sebanyak 433 dan Sampit sebanyak 757 hingga untuk Tahun 2016 tercatat sebanyak 2.788 kasus baik cerai talak maupun cerai gugat. Untuk Tahun 2017 selama 2 bulan terakhir, tercatat telah terjadi sebanyak 632 kasus perceraian yang tercatat di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup>Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PDF.

<sup>100</sup>Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PDF.

<sup>101</sup>Udi, Koran Tabengan, diunduh di website

<https://www.tabengan.com/bacaberita/102/2-608-istri-gugat-cerai-suami/>, tanggal 05 April 2018.

Selain itu berdasarkan data rekapitulasi perkara tahun 2017 di Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tahun 2017, diterima 824 perkara perceraian dengan jumlah perkara cerai talak sebanyak 221, dan jumlah perkara cerai gugat 603 perkara. Jumlah perkara perceraian yang diputus pada tahun 2017 ditambah dengan sisa perkara tahun 2016 dengan jumlah 106 perkara dan jumlah perkara cerai talak sebanyak 27, dan jumlah perkara cerai gugat 79 perkara, sehingga total keseluruhan perkara perceraian yang diputus pada tahun 2017 ialah **930 perkara**.<sup>102</sup>

Dengan banyaknya angka perceraian di Kalimantan Tengah, salah satunya yang menjadi perhatian ialah kasus perceraian di Kabupaten Kotawaringin Barat yakni Kota Pangkalan Bun, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau (berasa dalam wilayah Pengadilan yang sama yakni Pengadilan Agama Kelas 1 B Pangkalan Bun) tentunya ada banyak anak yang menjadi korban dalam perpisahan orang tuanya. Kondisi yang menjadi perhatian terjadi dalam usia anak dibawah usia 21 tahun (usia belum bisa mandiri)<sup>103</sup> agar tetap mendapatkan hak terjaminnya pertumbuhan jasmani, kecerdasan rohani, dan pendidikannya.<sup>104</sup>

Peneliti mengharapakan anak dalam usia belia tetap memperoleh kesejahteraannya dalam terjaminnya kesejahteraan anak (pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, dan pendidikan). Namun. dengan terjadinya ketidakutuhan rumah tangga menjadi masalah tersendiri bagi anak, yakni ketidakutuhan kasih sayang orang tua (psikologis) dan jaminan kesejahteraannya. Padahal anak merupakan aset negara yang dalam berbagai aspek kehidupan mempunyai peran yang besar. Sebagai kekuatan suatu negara, anak-anak perlu mendapat perlindungan.

Jika orang tua melalaikan kewajibannya atau berkelakuan yang sangat buruk, kekuasaannya terhadap anak dapat dicabut untuk waktu tertentu, pencabutan kekuasaan orang tua dapat dimintakan ke pengadilan oleh

---

<sup>102</sup>Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Tahun 2017, hal. 76.

<sup>103</sup>Kompilasi Hukum Islam, *Bab XIV Pemeliharaan Anak Pasal 98 bagian No.1*, Bandung, Fokusind Mandiri, 2013, hal.40.

<sup>104</sup>Kompilasi Hukum Islam, *Bab Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 77 bagian No.3....*, hal. 33.

salah satu orang tua, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa atau oleh pejabat berwenang, kekuasaan orang tua yang dicabut tidak menghilangkan kewajibannya untuk tetap memberi biaya pemeliharaan kepada anak.<sup>105</sup>

Dengan demikian jelas bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anaknya kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orang tua putus.

Anak mempunyai hak tertentu yang harus dipenuhi orang tua, sebaliknya orang tua juga memiliki hak yang harus dipenuhi anaknya. Hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak meliputi sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah anak (alimentasi) yang harus dipenuhi orang tua, terutama ayah, baik dalam masa perkawinan atau pun setelah terjadi perceraian.

---

<sup>105</sup> Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PDF.

## **BAB V**

# **IDENTIFIKASI PENYEBAB KELALAIAN ORANG TUA DALAM PELAKSANAAN BIAYA KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN ANAK PASCAPERCERAIAN YANG TERJADI DI MASYARAKAT**

### **A. Legalitas Hukum Pelaksanaan Biaya Kesejahteraan Pendidikan Anak Pascaperceraian Orang Tua**

Dengan terjadinya perceraian orang tua, maka kekuatan orang tua berakhir dan berubah menjadi perwalian. Oleh karena itu, jika perkawinan di putus oleh hakim maka harus pula di atur tentang perwalian anak-anak yang masih di bawah umur. Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang masih berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut, sebagaimana di atur dalam undang-undang.

Dalam hukum Islam, hak asuh anak dikenal dengan istilah hadhanah. Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu kaffalah dan hadhanah. Yang dimaksud dengan hadhanah atau kaffalah dalam arti sederhana ialah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeriharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqh karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah atau ibunya.

Pada dasarnya perwalian merupakan hal terpenting bagi kelangsungan hidup anak kecil (anak dibawah umur) atau anak yang masih belum bisa mengurus diri sendiri seperti anak-anak terlantar, baik dalam mengurus harta kekayaan maupun dalam mengurus lingkungannya sendiri atau dengan istilah lain yakni anak masih belum bisa atau belum cakap dalam bertindak hukum. Oleh karena itu maka perlulah ada seorang atau sekelompok orang yang dapat mengurus dan memelihara juga membimbing anak yang masih belum ada walinya atau yang belum ada yang mengurus dan melindungi anak dan hartanya.

Pada umumnya apabila anak yang masih di bawah umur, maka hak untuk memelihara dan mendidik anak tersebut akan diberikan kepada ibunya, hal ini sesuai dengan ketentuan agama dan juga peraturan perUndang-undangan yang berlaku sekarang khususnya dalam Undang-undang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, disebabkan bahwa anak-anak di bawah umur masih sangat memerlukan perhatian dari seorang ibu, sedangkan kepada seorang ayah diberikan tanggung jawab untuk membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak mereka tersebut sampai dewasa.<sup>106</sup> Jadi dalam hal ini apabila pihak yang diserahkan kewajiban memelihara dan mendidik anak tidak melaksanakan dengan baik, maka dapat saja digugat kembali oleh pihak lain yang berkepentingan terhadap anak tersebut. Gugatan tersebut dapat timbul setelah memperoleh hak asuh dan tanggung jawab dalam pemeliharaan dari anak tersebut, di mana dalam pelaksanaannya penerima hak tidak melaksanakan kewajibannya.

Ketentuan-ketentuan ini disebut sebagai salah satu cara penyelundupan hukum bagi perkawinan beda agama. Perkawinan yang dijalani dengan pebuh keharmonisan pada awalnya apabila tidak dijaga dengan baik, akan menimbulkan ketidakcocokkan diantara keduanya sehingga kebanyakan salah satu pasangan menginginkan adanya perceraian. Perceraian merupakan salah satu sebab dari putusnya perkawinan berarti dalam hal ini berakhirnya hubungan suami istri.

---

<sup>106</sup>Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PDF.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 41 menyebutkan bahwa salah satu akibat dari putusnya perkawinan adalah :<sup>107</sup>

1. Ibu atau ayah tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak. Jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan yang akan memberikan keputusan kepada siapa hak asuh anak tersebut kemudian akan diberikan;
2. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu, apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri .
4. Dalam Undang-Undang perkawinan tidak terdapat pasal yang menjelaskan hak asuh anak pasca cerai jatuh pada ayah atau ibu, akan tetapi terkait dengan hal ini Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 pasal 105 menjelaskan secara lebih rinci yaitu:
  - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
  - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada si anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya
  - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dari Undang-Undang perkawinan tahun 1974 pasal 41 dapat kita ambil kesimpulan bahwa hak asuh anak pasca cerai jatuh pada ibu, jika anak tersebut belum berumur 12 tahun. hak asuh anak yang terdapat dalam pasal 41 UU Perkawinan dan pasal 105 KHI dapat dipahami bahwa hak asuh anak jatuh pada ibu, sedangkan biaya pendidikan dan pemeliharaan yang dibutuhkan oleh anak tetap menjadi tanggung jawab ayah.

---

<sup>107</sup>Undang-Undang Nomor 1 Perkawinan Tahun 1974, PDF.

Selanjutnya sebagai mana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas di tengah jalan yang menyebabkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun putusan pengadilan. Dalam Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan ada 4 (empat) cara putusnya perkawinan, yaitu :<sup>108</sup>

1. Karena kematian;
2. Karena keadaan tak hadir suami atau istri, selama sepuluh tahun diikuti dengan perkawinan dari istrinya atau suaminya;
3. Karena keputusan hakim setelah ada perpisahan meja dan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan itu dalam register catatan sipil atau BS (*Burgerlijk Stand*);
4. Karena perceraian.

Selanjutnya pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri
3. Tata cara perceraian didepan siding pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri.

Sedangkan mengenai hal-hal yang dapat menjadi alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, yang terdiri dari<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup>Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, 2007, hal. 150.

<sup>109</sup>*Ibid.*



1. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
5. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Jika ada hal-hal lain yang dapat menjadi dasar untuk menuntut terjadinya perceraian perkawinan, salah satu pihak baik suami ataupun istri berhak untuk menuntut untuk pisah meja dan ranjang. Gugatan perceraian perkawinan harus di ajukan ke Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya suami mempunyai tempat tinggal pokok pada waktu mengajukan permohonan atau tempat tinggal sebenarnya bila tidak mempunyai tempat tinggal pokok.

Pasangan suami-istri beragama Islam yang salah satunya berniat untuk bercerai harus tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian, dalam proses perceraian berdasarkan KHI terdapat dua istilah yaitu ‘cerai gugat’ dan ‘cerai talak’. Pasal 116 KHI menegaskan hal tersebut: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapa terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”<sup>110</sup>

Berdasarkan penjelasan Pasal 14 UU Perkawinan dan PP 9/1975 diatur tentang cerai talak yaitu cerai yang dijatuhkan suami di depan pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam. Talak menurut Pasal 117

---

<sup>110</sup>*Kompilasi Hukum Islam*, Bandung:Fokusindo Mandiri, 2013, hal. 45-46.

KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi:<sup>111</sup>

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Mengacu pada UU Perkawinan, PP 9/1975, dan KHI bahwa seorang suami Muslim yang telah menikah secara Islam dan berniat menceraikan istrinya, terlebih dahulu mengajukan surat pemberitahuan tentang maksud menceraikan istrinya diikuti dengan alasan-alasan. Surat pemberitahuan tersebut disampaikan ke Pengadilan Agama, tempat ia berdomisili. Dengan demikian, sang suami meminta diadakan sidang oleh Pengadilan Agama untuk maksud tersebut.

Pengadilan Agama akan mempelajari isi surat pemberitahuan tersebut dan dalam selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari akan memanggil penggugat beserta istrinya guna meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian tersebut.

Hukum Negara Indonesia hanya mengakui talak yang diucapkan suami di depan Pengadilan Agama. Adapun talak yang diucapkan suami di luar Pengadilan Agama hanya sah menurut hukum agama. Di dalam artikel berjudul “Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan” (Hukum Online), Nasrulloh Nasution, S.H. menyatakan bahwa cerai talak yang dilakukan suami di luar Pengadilan Agama menyebabkan ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum sebagaimana diatur oleh Negara.

Perceraian pasangan Muslim hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama, Pasal 115 KHI juga menyebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil

---

<sup>111</sup>Kompilasi Hukum Islam..., hal. 48.

mendamaikan kedua belah pihak.<sup>112</sup> Tentang hal ini dilakukan melalui mediasi oleh mediator yang ditunjuk Pengadilan Agama. Adapun cerai gugat (gugatan cerai) hanya dapat diajukan oleh istri sebagaimana terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI:<sup>113</sup>

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atas kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayai tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.

Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat (2) KHI)<sup>114</sup>. Perceraian adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan yang diatur oleh undang-undang yaitu UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 39 UU Perkawinan menyebutkan<sup>115</sup>

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Baik pasangan Muslim maupun pasangan non-Muslim wajib melakukan perceraian di depan Pengadilan yaitu Pengadilan Agama untuk pasangan Muslim dan Pengadilan Negeri untuk Pasangan non-Muslim. Namun, ada perbedaan syarat dan ketentuan perceraian antara pasangan Muslim dan non-Muslim.

---

<sup>112</sup> Kompilasi Hukum Islam..., hal. 45.

<sup>113</sup> *Ibid.*, hal. 50.

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, PDF.

Pada Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur tentang Tata Cara Perceraian. Alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam PP 9/1975 adalah sebagai berikut:<sup>116</sup>

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Secara hukum agama Islam, suami dapat saja melakukan gugat talak atau menalak istrinya, baik secara lisan maupun tulisan. Namun, berdasarkan hukum Negara Indonesia yang mengatur tentang tata cara perceraian, penjatuhan talak dengan cara di luar pengadilan tersebut belum putus secara hukum. Hal ini dikuatkan oleh Nasrulloh Nasution, S.H. dalam artikelnya berjudul “Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan” dalam Hukum Online.

Nasrulloh menjelaskan bahwa di dalam hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, tidak diatur dan tidak dikenal pengertian talak di bawah tangan. Pengertian talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Pasal 117 KHI menyatakan: “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan

---

<sup>116</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, PDF.

Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131".<sup>117</sup> Jadi, seorang suami Muslim yang hendak menceraikan istrinya (yang juga Muslim) harus mengajukan gugat talak terlebih dahulu dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat berdomisili. Apabila ia berdomisili di luar negara, ia dapat memberikan surat pemberitahuan di wilayah istrinya berdomisili. Apabila baik suami maupun istri berdomisili di luar negara, suami dapat mengirimkan surat pemberitahuan di wilayah tempat mereka dahulu menikah di Indonesia.

Gugatan cerai dapat dilakukan seorang istri yang beragama Islam kepada suaminya (pasangan Muslim) melalui Pengadilan Agama atau baik suami maupun istri yang tidak beragama Islam melalui Pengadilan Negeri. Pihak penggugat menyampaikan surat pemberitahuan gugat cerai beserta alasan-alasannya kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri tempat ia berdomisili. Apabila ia berdomisili di luar negara, penggugat dapat memberikan surat pemberitahuan di wilayah suami atau istrinya berdomisili. Apabila baik suami maupun istri berdomisili di luar negara, suami atau istri sebagai penggugat dapat mengirimkan surat pemberitahuan di wilayah tempat mereka dahulu menikah di Indonesia.

1. Syarat administrasi umum yang harus dipenuhi penggugat, yaitu<sup>118</sup>
  - a. Surat nikah asli;
  - b. Fotokopi surat nikah 2 (dua) lembar, masing-masing dibubuhi materai 6000, kemudian dilegalisasi;
  - c. Fotokopi kartu tanda penduduk (ktp) terbaru penggugat;
  - d. Fotokopi kartu keluarga (kk);
  - e. Surat gugatan cerai sebanyak tujuh rangkap;
  - f. Panjar biaya perkara.

---

<sup>117</sup>Kompilasi Hukum Islam..., hal. 46.

<sup>118</sup>Diunduh di website <https://carapedi.com/2013/07/cara-syarat-prosedur-biaya-mengajukan-gugat-cerai/#>, pada tanggal 13 Juli 2018 pukul 11.31 WIB.

2. Adapun syarat khusus, yaitu<sup>119</sup>

- a. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, atau kartu BLT/BLSM atau Askin, jika ingin berperkara secara prodeo (gratis/cuma-cuma);
- b. Surat izin perceraian dari atasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- c. Duplikat akta nikah, jika buku nikah hilang atau rusak (dapat diminta di KUA);
- d. Fotokopi akta kelahiran anak dibubuhi materai, jika disertai gugatan hak asuh anak.
- e. Jika tidak bisa beracara karena sakit parah atau harus berada di luar negeri selama persidangan, penggugat dapat menggunakan jasa advokat atau surat kuasa insidentil.

Hal-hal lain yang perlu diantisipasi untuk perlengkapan persyaratan gugatan yaitu apabila bersamaan dengan gugatan perceraian diajukan juga gugatan terhadap harta bersama. Untuk itu, perlu disiapkan bukti-bukti kepemilikan, seperti sertifikat tanah (apabila atas nama penggugat/pemohon), BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor)/STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) untuk kendaraan bermotor, kuitansi, surat jual-beli, dan lain-lain atas nama penggugat.

3. Hak Asuh Anak dalam Undang-Undang

Seorang hakim akan mengetuk palu di pengadilan dan memberi keputusan akhir kepada siapa hak asuh anak akan diberikan. Terdapat peluang yang sama, antara pihak ibu ataupun ayah. Hal ini karena putusan hakim tidak diberikan serta merta tanpa pertimbangan. Melainkan didasarkan pada beberapa pertimbangan. Satu diantaranya hak asuh anak dalam undang-undang.<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup>Diunduh di website <https://carapedi.com/2013/07/cara-syarat-prosedur-biaya-mengajukan-gugat-cerai/#>, pada tanggal 13 Juli 2018 pukul 11.31 WIB.

<sup>120</sup>Garda Law Office, di unduh di website <https://www.advokatperceraian.com/undang-undang-tentang-hak-asuh-anak-jika-bercerai/>, pada tanggal 13 Juli 2018 pukul. 11.54 WIB.

Adapun dalam Undang-Undang, hak asuh anak bila terjadi perceraian orang tua sudah dijelaskan dalam beberapa pasal. Diantaranya pasal 45 ayat (2), pasal 98, dan pasal 105. Dengan adanya dasar hukum dan Undang-Undang yang mengatur, diharapkan anak tetap sejahtera dan tumbuh sebagaimana mestinya meskipun orang tuanya berpisah.<sup>121</sup>

Seperti mengambil keputusan yang tepat, seorang hakim pun membutuhkan pendekatan. Misalnya melalui aspek psikologi dan sosial. Pendekatan psikologi ditujukan hakim memahami kondisi anak bukan sekedar dari segi umur, tetapi kualitas kematangan psikologi anak. Bila anak dirasa sudah matang secara psikologis, maka anak dikatakan mumayyiz. Perlu diketahui, pertimbangan psikologis juga berlaku bagi orang tua yang mendapat hak mengasuh anak. Hal ini penting lantaran tidak sedikit kasus orang tua bermasalah, baik dengan diri sendiri atau dengan lingkungan sekitar dan tidak terkecuali anak. Ikatan emosional orang tua dengan anak juga menjadi pertimbangan. Bila ternyata kondisi orang tua tidak baik, jelas tidak mampu merawat anak. Salah-salah malah bisa memperburuk kondisi anak yang sudah cukup terguncang pasca perceraian orang tua.<sup>122</sup>

Aspek psikologi bukan satu-satunya untuk memutuskan hak asuh anak jika bercerai. Bisa tidak adil bagi hakim bila hanya mempertimbangkan psikologis anak. Keadilan hukum juga mesti mendahulukan hak anak kemudian menilai bagaimana orang tua bisa berperan sebagai sosok yang berkarakter dan memberi teladan. Walaupun secara jelas sudah dicantumkan dalam pasal 105 (a) KHI bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (di bawah 12 tahun) menjadi hak ibunya. Tetapi hakim bisa melakukan diskresi.<sup>123</sup>

Diskresi yaitu kebebasan mengambil keputusan sebelum menghadapi situasi. Artinya masih ada kemungkinan mengambil hak

---

<sup>121</sup>*Ibid.*

<sup>122</sup>Garda Law Office, di unduh di website <https://www.advokatperceraian.com/undang-undang-tentang-hak-asuh-anak-jika-bercerai/>, pada tanggal 13 Juli 2018 pukul. 11.54 WIB.

<sup>123</sup>*Ibid.*

asuh anak dari ibunya bila selama proses persidangan didapati sejumlah fakta. Fakta-fakta yang dimaksud diantaranya ibunya seorang pemabuk, penjudi, berisiko menelantarkan anak, dan ringan tangan. Pada kondisi demikian, maka hak asuh anak jika bercerai akan jatuh kepada pihak ayah.<sup>124</sup>

#### 4. Biaya Pengasuhan Anak

Landasan kewajiban ayah menafkahi anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggung jawab menjamin nafkah hidupnya. Orang yang paling dekat dengan anak adalah ayah dan ibunya, apabila ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak di rumah maka ayah bertanggung jawab mencari nafkah anaknya.<sup>125</sup>

Lisa Soemarto, MA. dalam artikelnya yang berjudul “Biaya Pasca Perceraian, Siapa Yang Menanggung?” menjelaskan bahwa Perceraian merupakan momok menakutkan bagi setiap keluarga (suami, istri, dan anak-anak), penyebab perceraian bisa bermacam-macam, yaitu antara lain gagal berkomunikasi, ketidaksetiaan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, pernikahan usia dini, perubahan budaya, dan lain sebagainya.<sup>126</sup>

Pasca perceraian ada penyesuaian-penyeseuain yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak (mantan suami dan mantan istri) terhadap kehidupan mereka yang baru. Terutama masalah finansial, apalagi dari perkawinan antara mereka telah dilahirkan anak (anak).<sup>127</sup>

Jika selama pernikahan, suami menjadi pendonor keuangan keluarga, maka pasca perceraian mantan istri harus bekerja keras

---

<sup>124</sup>*Ibid.*

<sup>125</sup>Saifullah, *Problematika Anak dan Solusinya (Pendekatan Sadduzzara'i)*, Artikel Jurnal Mimbar hukum, Jakarta, 1999, hal.48.

<sup>126</sup>Lisa Soemarto, MA. Dalam artikelnya yang berjudul “*Biaya Pasca Perceraian, Siapa Yang Menanggung?*”, yang di terbitkan secara online di website <https://finance.detik.com/perencanaan-keuangan/d-1857627/biaya-anak-pasca-perceraian-siapa-yang-menanggung>, pada tanggal 13 Juli 2018 pada pukul 12.15 WIB.

<sup>127</sup>*Ibid.*



untuk menghidupi diri sendiri. Terlebih jika hak asuh anak ada di tangan mereka, maka para ibu tersebut bertanggung jawab untuk “menanggung” biaya hidup anak. Pada umumnya, setelah bercerai banyak keluarga mengalami penurunan standar kehidupan hingga lebih dari 50%. Inilah yang tidak seharusnya terjadi, pasca perceraian anda (para ibu) tetap dapat hidup dengan standar yang sama seperti ketika anda masih dalam perkawinan. Berikut adalah akibat-akibat hukum terhadap kewajiban kedua orang tua, dan bagaimana hubungannya dengan *financial planning* yang sudah seharusnya rencanakan oleh kedua belah pihak.<sup>128</sup>

- a. Jika perkawinan putus karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak.
  - 1) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan si anak, apabila kemudian si bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. (hukum positif yakni berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).
  - 2) Bapak tetap berkewajiban memberi nafkah untuk anak menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). (Penegasan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ◇ menurut pasal 149 huruf d juncto pasal 156 huruf d KHI berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991) .
  - 3) Istri dapat dibenarkan meminta kepada suami untuk tetap memberikan nafkah kepada nya untuk jangka waktu tertentu pasca perceraian, melalui mekanisme pengadilan.

---

<sup>128</sup> *Ibid.*

- b. Dalam praktek kehidupan sehari-hari seringkali timbul pertanyaan, jika ada pembagian harta gono gini (harta benda bersama dalam perkawinan), bagaimana kemudian skema untuk pembiayaan anak (anak) pasca perceraian? Adakah “letak khusus” dalam harta gono gini tersebut?. Mengacu pada kedua sistem hukum di atas (baik hukum positif maupun hukum Islam), maka tidak ada “letak khusus” biaya untuk anak-anak yang orang tuanya bercerai dalam harta gono gini. Redaksi dari kedua peraturan perundang-undangan di atas sudah sangat jelas. Bahwa kewajiban untuk membiayai anak ada di pihak bapak, dan ibu dapat memikul biaya tersebut jika pada kenyataannya bapak tidak dapat menjalankan kewajibannya tersebut (misalnya tidak punya penghasilan). Jadi walaupun harta gono gini telah dibagikan kepada bekas istri dan suami, tidak lantas menggugurkan kewajiban si bapak untuk memberi nafkah.
- c. Biaya bagi anak meliputi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga seluruh hak-hak si anak dapat terjamin dengan baik yaitu hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
- d. Biaya patungan antara mantan suami dan istri baru muncul apabila dalam kenyataannya si bapak tidak memiliki kemampuan menanggung sendiri biaya si anak.
- e. Kelanjutan dana pendidikan untuk anak, sebaiknya diputuskan sesuai kesepakatan bersama. Meskipun mengacu pada hukum Negara maupun agama, biaya tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab bapak.
- f. Mantan suami istri dapat membuat kesepakatan bersama untuk bisa saling mengawasi dan memelihara investasi yg sudah berjalan demi kepentingan si anak. Jika diperlukan perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akta notariil.

Tujuan dilegalkan pembiayaan untuk anak adalah untuk menghindari salah satu pihak meningkari kewajiban. Tidak perlu dilegalkan, karena apabila seorang bapak ingkar untuk memberikan nafkah kepada anaknya pasca perceraian, maka jelas ia melanggar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan khususnya pasal 41. Dan atas pelanggaran tersebut akan ada konsekuensi hukum, karena hukum bersifat memaksa. Si Ibu dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan berdasar kan pada ketentuan pasal 1365 (Perbuatan Melawan Hukum) dan atas dasar wanprestasi. Tindakan-tindakan preventif harus dilakukan untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak terduga pada masa yang akan datang, seperti perceraian. Salah satu tindakan preventif yang dapat dilakukan adalah membuat suatu perencanaan keuangan keluarga sehingga anak-anak tetap dapat terpenuhi kebutuhannya hingga selesai pendidikan tertinggi dan dapat mandiri secara financial.<sup>129</sup>

Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) anak adalah seseorang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ayat (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Jika kita lihat sebagian pasal pada undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak diatas, tentu ada hal yang perlu di berikan elaborasi, terutama menyangkut batasan anak dan batasan nikah, karena kedua ukuran tersebut masih bisa menimbulkan perdebatan yang panjang.

---

<sup>129</sup>Lisa Soemarto, MA. Dalam artikelnya yang berjudul “*Biaya Pasca Perceraian, Siapa Yang Menanggung?*”, yang di terbitkan secara online di website <https://finance.detik.com/perencanaan-keuangan/d-1857627/biaya-anak-pasca-perceraian-siapa-yang-menanggung>, pada tanggal 13 Juli 2018 pada pukul 12.15 WIB.

## **B. Identifikasi Kelalaian Pelaksanaan Kesejahteraan Pendidikan Anak Pascaperceraian Orang Tua yang terjadi di Masyarakat**

Hukum berperan mengatur kehidupan masyarakat, hukum juga dibuat sebagai pedoman bertingkah laku manusia agar menciptakan kehidupan yang aman dan tenteram. Hukum sendiri berlaku apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum yang sudah ada. Hukum bersifat mengikat setiap anggota masyarakat. Ketika berumur 17 hingga 18 tahun, maka seseorang dianggap sudah sadar hukum sehingga hukum sudah mengikat individu tersebut. Dengan demikian, maka pelaksanaan hukum dapat dijalankan dengan baik pada anggota masyarakat.

Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak-anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.<sup>130</sup>

Di dalam Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dinyatakan kedudukan anak terdapat dalam kebijaksanaan pasal 34 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu kawin.<sup>131</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak secara eksplisit diatur bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas usia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan anak, dimana kematangan sosial, pribadi dan mental seseorang anak dicapai pada umur tersebut. Pengertian ini digunakan sepanjang memiliki keterkaitan dengan anak secara umum, kecuali untuk tertentu menurut undang-undang menentukan umur yang lain. Dalam hal ini, pengertian anak mencakup situasi dimana seseorang yang dalam

---

<sup>130</sup>Sholeh Soeaidy dan Zulkair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Cv. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hal. 4.

<sup>131</sup>*Ibid.*, hal. 5.

kehidupannya mencapai tumbuh kembangnya, membutuhkan bantuan orang lain (orang tua atau orang dewasa).<sup>132</sup>

Berdasarkan pengamatan peneliti dan dalam membaca beberapa literatur (buku dan putusan hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun) kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan biaya kesejahteraan pendidikan anak pascaperceraian orang tua, implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari ketidakutuhan rumah tangga adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal

- a. Tidak diajukannya hak *hadhanah* yang menyertakan biaya pemeliharaan anak dalam posita pengajuan perkara perceraian atau tidak mengajukan perkara hak *hadhanah* yang menyertakan biaya pemeliharaan anak setelah pascaperceraian

Alasan tidak ingin mempersulit atau menambah waktu pengurusan perkara tersebut di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri (non muslim) untuk mendapatkan putusan hakim. Sehingga ketetapan hukum legal dan hukum Islam tidak dapat mengikat pelaku perceraian tersebut pascaperceraian, kecuali ada pertimbangan, kreatifitas hakim ( inisiatif), dan penetapan hakim dalam memberikan putusan atas hak *hadhanah* <sup>133</sup> dalam pelaksanaan biaya pemeliharaan anak terutama berkaitan biaya pendidikan sebelum terjadinya perceraian.

- b. Tidak adanya perjanjian pembagian harta pascaperceraian yang ditujukan untuk keperluan anak secara tertulis

Perjanjian pascaperceraian yang ditujukan untuk keperluan anak secara tertulis sangat perlu dilakukan. Berdasarkan sesi

---

<sup>132</sup>Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 3.

<sup>133</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 228. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 1 angka 2 ayat 2, Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Penetapan hakim yaitu: putusan hakim yang bersifat *declaratoir* hakim menetapkan suatu peristiwa tertentu.

pembuatan posita yang dilakukan peneliti selaku staf POSBAKUM (Pos Bantuan dan Layanan Hukum di Pengadilan Agama Pangkalan Bun), beberapa kasus tidak ingin menyertakan biaya pemeliharaan anak dalam posita pengajuan perkara perceraian atau tidak mengajukan perkara hak hadhanah yang menyertakan biaya pemeliharaan anak setelah pascaperceraian dengan alasan tidak ingin mempersulit atau menambah waktu pengurusan perkara tersebut di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri (non muslim) untuk mendapatkan putusan hakim, karena telah melakukan perjanjian secara tertulis dengan menyertakan saksi keluarga dan pejabat di masyarakat (Ketua RT atau Kepala Desa atau Kepala Kelurahan) untuk melakukan penetapan dan pelimpahan harta bersama untuk keperluan anak kepada mantan istri atau suami yang menjadi pemelihara anak tersebut atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama.

Perjanjian ini bersifat tidak berkekuatan hukum mutlak, kelalaian, kemangkiran, dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan biaya kesejahteraan anak pascaperceraian orang tua kerap terjadi. Hal ini disebabkan kepemilikan harta tersebut belum atas nama anak tersebut, sehingga bisa saja orang tuanya melakukan pengambilan harta tersebut untuk keperluan pribadinya. Perlu adanya pengawasan dan perlindungan hak anak atas harta tersebut oleh saksi terkait.

## 2. Faktor Eksternal

- a. Tidak ada kesadaran pribadi atau berusaha menghindari kewajibannya sebagai orang tua.

Kewajiban pemeliharaan anak oleh orang tua kandungnya tidak dapat putus oleh berakhirnya hubungan pernikahan, karena anak dengan orang tua terikat pertalian darah (*nasab*). Moralitas yang bersifat lumrah ini semakin hari semakin tergerus oleh egoisme pribadi yang dilatarbelakangi oleh tanggung jawab baru (menikah lagi) bagi pasangan bercerai (orang tua), sehingga yang menjadi

fokus pembiayaan kesejahteraan terpusat kepada tanggung jawab baru, sehingga anak yang terlahir dari pernikahan sebelumnya dan dalam pengasuhan mantan istri atau suami dianggap tidak lagi menjadi tanggungan.

- b. Adanya Krisis ekonomi (Pendapatan) oleh pihak orang tua pascaperceraian

Adanya tanggungan hutang atau pinjaman, sehingga pendapatan yang seharusnya dapat disisihkan untuk keperluan anak, terutama agar anak tidak putus dalam pendidikan menjadi teralihkan.

- c. Pihak calon mantan suami atau istri berstatus *ghaib* (tidak diketahui alamat jelasnya)

Dalam perkara pihak calon mantan suami atau istri berstatus *ghaib* (tidak diketahui alamat jelasnya), maka tuntutananya berupa biaya pemeliharaan anak setelah pascaperceraian tidak dapat dituntut, namun kewajiban tersebut dapat teralih kepada keluarga calon mantan istri atau suami yang bertalian *nasab* dengan anak tersebut agar tetap terjamin kesejahteraan pendidikan anak.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur mengenai Kedudukan Anak. Pasal 26 ayat: (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:<sup>134</sup>

1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

---

<sup>134</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PDF.

Ayat (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku.<sup>135</sup>

Kewajiban dan Tanggung Jawab, Pasal 20: Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah, Pasal 21 Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.<sup>136</sup>

Walaupun dalam pasal diatas telah ditetapkan keluarga dari orang tua pascaperceraian tersebut yang berhak atas pelaksanaan biaya kesejahteraan pendidikan anak tersebut, tetap saja, tidak dapat menjamin, karena dibatasi kemampuan terbatas atas banyak tanggungan lain. Orang tua kandunglah yang paling pertama yang harus memperhatikan biaya pemeliharaan tersebut, selanjutnya adalah tanggung jawab secara sukarela dari keluarga, dan masyarakat. Disinilah peran negara sangat diharapkan untuk perhatian.pemberian bantuan untuk keringanan atau pembebasan biaya pendidikan untuk anak pascaperceraian akan menjadi cikal bakal kemandirian penerus bangsa.

---

<sup>135</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PDF.

<sup>136</sup>*Ibid.*



# **BAB VI**

## **PELAKSANAAN BIAYA**

### **KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN**

#### **ANAK PASCA PERCERAIAN**

#### **ORANG TUA IMPLEMENTASI**

#### **KAJIAN UNDANG-UNDANG**

#### **NOMOR 4 TAHUN 1979 DAN**

#### **HUKUM ISLAM**

#### **A. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1979**

Hukum Progresif menurut oleh Satjipto Rahardjo Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.<sup>137</sup> Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat. Pengamalan negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan kesejahteraan masyarakat ber korelasi sangat erat bahkan menyatu dan selaras antara Negara hukum, desentralisasi, desentralisasi asimetris dan kesejahteraan masyarakat. Adapun teori kesejahteraan masyarakat yang sudah menjadi salah satu fungsi hukum.<sup>138</sup>

Kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial merupakan tanggung jawab orangtua atas kesejahteraan anak mengandung

---

<sup>137</sup>Satjipto Rahardjo, *Membelah Hukum Progresif* (ed), Joni Emerzon, Gede A.B. Wiranata, Firman Muntaqo, Buku Kompas, Jakarta, 2006, hal. 214.

<sup>138</sup>Jimly Asshidiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, Cetakan Kedua November, LP3ES, Jakarta., 2015, hal. 98.

kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orangtua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan, serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. Penjelasan Pasal 9 UU No.4 Tahun 1979 Kesejahteraan Anak

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak dari orangtuanya, kewajiban untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak bersifat tetap sampai si anak mampu berdiri sendiri.<sup>139</sup>

Secara hukum kewajiban antara suami dan istri akan timbul apabila perkawinan tersebut telah dilakukan atau dilangsungkan, dengan kata lain kewajiban seorang istri atau suami tidak akan ada apabila seorang pria atau wanita belum melangsungkan perkawinan. Adapun kewajiban dan hak yang seimbang antara suami maupun istri apabila dibarengi dengan kewajiban yang sama pula yaitu kewajiban untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi dasar dalam membangun rumah tangga.

Kewajiban bersama antara suami dan istri dalam membina dan menjalin rumah tangga akan luntur apabila rumah tangga yang dibangun tersebut mengalami goncangan dan terlebih parahnya lagi apabila tatkala rumah tangga tersebut bubar, perihal mengenai hal ini sebelumnya telah ada dan diatur dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam Pasal 45 disebutkan sebagai berikut :

1. Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya.
2. Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus.

---

<sup>139</sup>M. Yahya Harahap, Acara Perdata, Jakarta : Sinar Grafika., 2011, hal. 204.

Selanjutnya dalam Pasal 47 dinyatakan sebagai berikut :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.

Dari beberapa penjelasan UU di atas, maka dapat disimpulkan bahwa UU Perkawinan mengatur kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya sekalipun rumah tangga telah putus karena perceraian. Kewajiban orangtua tersebut meliputi:

1. Orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Orangtua mewakili anak mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan
3. Sebagaimana adapun di dalam Pasal 41 UU Perkawinan dijelaskan bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya pemeliharaannya dan pendidikan yang diperlukan anak, Kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun kekuasaan sebagai orangtua dicabut.

Dalam Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 ayat 1 sampai 3 yakni sebagai berikut:

Ayat 1

- a. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
- b. Usaha Kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.

Ayat 2

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Ayat 3

- a. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung;
- b. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Pasal 9 UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial. Tanggung jawab orangtua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan, serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. Namun dengan adanya faktor internal dan eksternal yang telah dijabarkan pada penjelasan BAB V mengenai identifikasi kelalaian dalam pelaksanaan biaya kesejahteraan pendidikan anak pascaperceraian orang tua menunjukkan bahwa penerapan hukum tidak dapat berjalan dengan baik sesuai hukum yang berlaku.

Ketidaksinkronan legalitas hukum dengan fakta hukum (*law in action*) yang terjadi di masyarakat menjadi bukti mulai merosotnya moralitas kesadaran hukum sebagai orang tua, sebab hukum yang bersifat mengatur dan mengikat menjadi ketidakjelasan hukum mengenai biaya kesejahteraan pendidikan anak ketika perkara ini tidak dimasukkan dalam posita perkara perceraian mengenai hak *hadhanah* berupa biaya pemeliharaan anak, atau tidak mengajukan perkara mandiri perkara *hadhanah*, sebagai upaya pelaku perceraian yang menginginkan efisiensi waktu yang cepat (tanpa jadwal sidang yang panjang).

Dengan adanya sikap keputusan terhadap pernikahan saja yang diminta untuk diadili oleh pelaku perceraian dan hal ini seringkali

merugikan hak-hak anak maka peneliti mewacanakan bahwa pendampingan dari advokat atau paralegal sangat diperlukan untuk mengupayakan terjadinya kesepakatan antar para pihak tentang hak asuh dan hak nafkah anak yang kemudian dikuatkan dalam putusan hakim. Jika tidak tercapai kesepakatan maka tuntutan tentang hak asuh dan hak nafkah anak dimasukkan dalam petitum supaya diputuskan hakim dalam amarnya. Dengan adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan eksekutorial maka kepastian hukum guna melindungi hak-hak anak dapat diwujudkan.

## **B. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Dalam pandangan ajaran Islam terhadap anak menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia. Anak mendapatkan kedudukan dan tempat yang istimewa dalam Nash Al-Qur'an dan Al-Hadist, Karena itu di dalam pandangan Islam anak itu harus diperlakukan secara manusiawi, diberikan pendidikan, pengajaran, keterampilan dan akhlakul karimah agar anak tersebut kelak dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup dimasa depan.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ<sup>١٤٠</sup> وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. At Talaq [65]:7)<sup>140</sup>

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Namun karena adanya faktor internal dan eksternal yang telah dijabarkan pada

---

<sup>140</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid VII, Widya kencana, Jakarta, 2011, hal.189.

BAB V mengenai faktor penyebab kelalaian pelaksanaan biaya kesejahteraan pendidikan anak maka diperlukan kesepakatan antara orangtua mengenai hak asuh dan hak nafkah pasca perceraian. Supaya kesepakatan tersebut menjadi kuat maka perlu dimasukkan dalam putusan hakim tentang perceraian. Jika para pihak tidak menemukan titik temu maka tentang hal hak asuh dan nafkah anak ini hendaknya didiskusikan dengan hakim untuk mendapat keputusan yang terbaik, bisa dalam forum mediasi ataupun dengan memasukkan dalam posita dan petitum surat gugat. Dalam hal ini sangat diperlukan pendampingan dari pihak-pihak yang lebih paham hukum misalnya advokat dan LSM.

Di dalam KHI yang memuat hukum materil tentang perkawinan, kewarisan dan juga wakaf yang dirumuskan secara sistematis hukum Islam di Indonesia secara konkrit, maka karena itu perlu ditinjau beberapa hal mengenai ketentuan-ketentuan dalam KHI yang mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Pasal 77 KHI menyebutkan :

1. Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami Istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami Istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami Istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Berkaitan kewajiban orang tua setelah putusnya perkawinan, KHI dalam pasal- pasalnya menggunakan istilah dengan namanya pemeliharaan anak yang dimuat di dalam Bab XIV Pasal 98 sampai dengan Pasal 106, tetapi secara eksplisit pasal yang mengatur kewajiban pemeliharaan anak jika adanya perceraian hanya terdapat didalam Pasal 105 dan Pasal 106. Dalam Pasal 98 KHI ditegaskan :

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orangtuanya tidak mampu.

Sementara Pasal 105 KHI dalam hal terjadinya perceraian, menyebutkan:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Sedangkan menyangkut harta yang dimiliki anak, orang tua berkewajiban untuk merawat dan mengembangkan harta tersebut, hal ini diatur di dalam Pasal 106 KHI yang menyebutkan :

1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau masih dibawah pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan kecuali karena keperluan yang sangat mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau sesuatu kenyataan tidak dapat dihindarkan
2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1)

Pasal-Pasal yang terdapat dalam KHI tentang *hadhanah* menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan material dan non material kepada anak merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Lebih lagi KHI membagi tugas yang harus dilakukan orangtua sekalipun

mereka telah berpisah. Anak yang belum mumayyiz tetap diasuh oleh ibunya sedangkan pembiayaan tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari ayah.

KHI juga menentukan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya, sedangkan apabila anak tersebut sudah *mumayyiz* ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya.

Hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM, berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembangkan kewajiban yaitu melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*) hak-hak anak.<sup>141</sup> Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 26 tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab keluarga dan Orang Tua dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara, mendidik dan melindungi anaknya. Sedangkan di dalam pasal 31 ayat 2 Bab VI tentang Kuasa Asuh dijelaskan bahwa apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga tidak dapat melaksanakan fungsinya maka kuasa asuh dapat dialihkan kepada lembaga yang berwenang.

Pengasuhan oleh Lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial. Selain itu, masyarakat juga memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak baik dilakukan oleh perseorangan, lembaga sosial anak, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa.<sup>142</sup>

Penegasan hak anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 ini merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dari KHA dan norma hukum nasional. Dengan demikian, Pasal 4 s/d 19 UU No. 23 tahun 2002 menciptakan norma hukum (legal norm) tentang apa yang menjadi hak-hak

---

<sup>141</sup>Keputusan Menteri sosial, *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak*, Menteri Sosial, 2010, hal. 11.

<sup>142</sup>Fuadi, *Pemenuhan Hak Anak Oleh Pengelola Panti Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan studi kasus Banda Aceh*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pasca Sarjana Syiah Kuala, No 1 Agustus, 2013, hal. 2.



anak. Hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar.<sup>143</sup>

Pada pasal 4 disebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dapat dikatakan, Pasal 4 ini merupakan *primary laws* (norma hukum utama), yang menjadi inspirasi bagi norma hukum dalam pasal lainnya, yang secara teoritis dapat disebut sebagai *secondary laws*. Karenanya, Hak hidup sebagai hak yang tidak dapat diabaikan dalam keadaan apapun, termasuk situasi darurat (*emergency*).<sup>144</sup>

Hak anak atas pendidikan meliputi hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri anak sesuai dengan bakat, minat, dan kecerdasannya. Hak ini merupakan turunan dan pelaksanaan dari Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Bahkan, Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 secara eksplisit memprioritaskan pendidikan dengan alokasi anggaran dalam APBN serta dari APBD sebesar minimal 20 persen.<sup>145</sup>

Kemudian para ulama fikih menyatakan wajib hukumnya untuk merawat dan mendidik, namun berbeda pendapat di dalam persoalan hak. Hadanah atau biasa dengan hak asuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua, baik dalam masa perkawinan atau bahkan perkawinan itu telah putus karena perceraian. Pada masalah hak asuh anak tetap diberikan kepada orang tua, sesuai yang tertuang dalam KHI dan UU No.1 Tahun 1974.

---

<sup>143</sup>Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, KPAI: Jakarta, t.t., hal 11.

<sup>144</sup>Keputusan Menteri sosial, *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak*, Menteri Sosial, 2010, hal. 11.

<sup>145</sup>Keputusan Menteri sosial, *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak*, Menteri Sosial, 2010, hal. 14.

Sebagai landasan Hukum tentang kewajiban orangtua untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut di dalam UU Perkawinan pasal 45 ayat 1 dan 2 di jelaskan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dalam Pasal 41 UU Perkawinan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Pasal 49 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut”.

Dari bunyi ketentuan tersebut dapat kita simpulkan, baik anak itu di bawah pemeliharaan bapak atau ibu, maka yang menjamin jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ialah bapak. Mengenai jumlah besarnya biaya ditentukan atas dasar kebutuhan anak, dan ketentuan tersebut diselaraskan dengan keadaan ekonomi orang tua. Apabila orang tua dalam keadaan kuat ekonominya, maka ia wajib memberikan biaya sesuai dengan kebutuhan anak. Sebaliknya apabila keadaan ekonomi orang tua dalam keadaan lemah, maka kewajiban orang tua itu harus sesuai dengan kebutuhannya.

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW., yang artinya: “Kamu sekalian adalah pemimpin, dan kamu sekalian bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Seorang Amir (raja) adalah pemimpin, seorang suami pun pemimpin atas keluarganya, dan isteri juga pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya.”

Berkaca dengan pentingnya pendidikan anak dan telah tegas di jabarkan secara hukum legal dan hukum Islam maka bahwa orang tua lah yang memiliki tanggung jawab atas pembiayaan kesejahteraan anak baik dalam pernikahan ataupun pasca perceraian, karena pada hakikatnya anak memiliki talian nasab yang tidak dapat diputus , dan bersifat mutlak. Pelaksanaan biaya kesejahteraan anak pasca perceraian orang tua dalam hal ini bertujuan melindungi *maqasid syariah* mengenai perlindungan terhadap *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-aql* (menjaga akal) sesuai dengan kaidah fiqih

الضَّرَّاءُ يُزَالُ

Artinya:” Kemudaratan harus dihilangkan.”



## **BAB VII**

# **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Problematika pelaksanaan biaya kesejahteraan pendidikan pacapercaian orang tua yang terjadi di masyarakat yakni sebagai berikut:

Sudah diketahui secara umum kewajiban seorang ayah baik masih dalam terikat pernikahan maupun pasca perceraian, anak tetap menjadi tanggung jawab bersama, yakni ayah dan ibunya dalam memberikan kesejahteraan, akan tetapi seiring perkembangan jaman, kepedulian mengenai hal lumrah ini menjadi tergerus oleh sikap tidak bertanggung jawab, sehingga setelah terjadinya perceraian anak korban perceraian menjadi tidak diperhatikan secara penuh lagi kesejahteraannya bahkan lalai dalam bertanggung jawab. Mengenai tanggung jawab orang tua kepada anak tercantum di dalam Firman Allah SWT. Q.S. an Nisa[4]:9 yang artinya “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”

Pelaksanaan biaya nafkah pendidikan pasca perceraian orang tua kepada anak hingga usia dewasa yakni sampai usia 21(dua puluh satu) tahun atau sudah dapat hidup mandiri. Sangat jelas manfaat pendidikan bagi anak dan dalam pelaksanaan biaya nafkah kesejahteraan pendidikan, sebab ini berarti mempersiapkan anak dengan baik untuk mermfokuskan diri dengan pendidikan pada usia

dini, yang artinya:”Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang berikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.(QS. At Thalâq [65]:7)”

Berdasarkan dalil diatas dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah, karena anak merupakan anugerah dari Allah SWT., yang harus dilindungi. Hal ini karena pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak dari orangtuanya, kewajiban untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak bersifat tetap sampai si anak mampu berdiri sendiri

2. Identifikasi kelalaian orang tua dalam pelaksanaan biaya kesejahteraan pendidikan anak pascaperceraian orang tua yang terjadi di masyarakat, yakni terbagi menjadi 2 (dua) faktor, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Internal

- 1) Tidak diajukannya hak *hadhanah* yang menyertakan biaya pemeliharaan anak dalam posita pengajuan perkara perceraian atau tidak mengajukan perkara hak *hadhanah* yang menyertakan biaya pemeliharaan anak setelah pascaperceraian.
- 2) Tidak adanya perjanjian pembagian harta pascaperceraian yang ditujukan untuk keperluan anak secara tertulis.

b. Faktor Eksternal

- 1) Tidak ada kesadaran pribadi atau berusaha menghindari kewajibannya sebagai orang tua.
- 2) Adanya Krisis ekonomi (Pendapatan) oleh pihak orang tua pascaperceraian
- 3) Pihak calon mantan suami atau istri berstatus ghaib (tidak diketahui alamat jelasnya).

3. Implementasi hukum dalam pelaksanaan kesejahteraan pendidikan anak pascaperceraian di dalam kajian Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 dan hukum Islam, yakni sebagai berikut:

Landasan kewajiban ayah menafkahi anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggung jawab menjamin nafkah hidupnya. Orang yang paling dekat dengan anak adalah ayah dan ibunya, apabila ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak di rumah maka ayah bertanggung jawab mencari nafkah anaknya.

Pasca perceraian harus ada penyesuaian-penyeseuin yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak (mantan suami dan mantan istri) terhadap kehidupan mereka yang baru. Terutama masalah finansial, apalagi dari perkawinan antara mereka telah dilahirkan anak (anak). Pihak-pihak yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Kompilasi Hukum Islam adalah orang tua, masyarakat dan pemerintah. Maka dari itu jika diadakan perjanjian pascaperceraian mengenai nafkah anak baik melalui putusan pengadilan ataupun pembuatan surat perjanjian diluar pengadilan dengan menghadirkan saksi.

Berkaca dengan pentingnya pendidikan anak dan telah tegas di jabarkan secara hukum legal dan hukum Islam maka bahwa orang tualah yang memiliki tanggung jawab atas pembiayaan kesejahteraan anak baik dalam pernikahan ataupun pasca perceraian, karena pada hakikatnya anak memiliki talian nasab yang tidak dapat diputus, dan bersifat mutlak.

Pelaksanaan biaya kesejahteraan pendidikan anak pasca perceraian orang tua dalam hal ini bertujuan melindungi *maqasid syariah* mengenai perlindungan terhadap *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-aql* (menjaga akal) sesuai dengan kaidah fiqih, ” Kemudaratn harus dihilangkan.” Oleh karena itu diperlukan kesepakatan antara orangtua mengenai hak asuh dan hak nafkah pasca perceraian.

Kesepakatan pelaksanaan pembiayaan tersebut agar menjadi kuat, maka perlu dimasukkan dalam putusan hakim tentang perceraian. Jika para pihak tidak menemukan titik temu maka tentang hal hak asuh dan nafkah anak ini hendaknya didiskusikan dengan hakim untuk mendapat keputusan yang terbaik, bisa dalam forum mediasi ataupun dengan memasukkan dalam posita dan petitum surat gugat. Dalam hal ini sangat diperlukan pendampingan dari pihak-pihak yang lebih paham hukum misalnya advokat dan LSM.

## **B. Saran**

Dengan adanya sikap pemutusan terhadap pernikahan saja yang diminta untuk diadili oleh pelaku perceraian dan hal ini seringkali merugikan hak-hak anak maka peneliti mewacanakan bahwa pendampingan dari advokat atau paralegal sangat diperlukan untuk mengupayakan terjadinya kesepakatan antar para pihak tentang hak asuh dan hak nafkah anak yang kemudian dikuatkan dalam putusan hakim. Jika tidak tercapai kesepakatan maka tuntutan tentang hak asuh dan hak nafkah anak dimasukkan dalam petitum supaya diputuskan hakim dalam amarnya. Dengan adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan eksekutorial maka kepastian hukum guna melindungi hak-hak anak dapat diwujudkan.

Jaminan kesejahteraan pendidikan anak selain menjadi tanggung jawab orang tua, dan keluarga kandung anak tersebut, tapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat dan negara. Prioritas bantuan dana dari sekolah atau pemerintah yang ditujukan kepada pelajar kurang mampu juga ditujukan kepada anak berorang tua tunggal (akibat perceraian hidup atau perceraian mati) sebagai bentuk kepedulian bersama dalam dunia pendidikan. Sehingga dengan kerjasama dalam memperhatikan dan memberikan jaminan pendidikan, tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena dengan alasan biaya yang dilatarbelakangi perceraian orang tuanya (pencari nafkah orang tua tunggal).



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan

- Himpunan Undang-Undang RI tentang Pelanggaran HAM & UU, 2008  
*Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Fokusind Mandiri, 2013.  
*Peraturan Pemerinah RI Nomor UU No. 1 tahun 1974 Tentang Pernikahan (PDF)*, ttp., ttp., tth..  
Tim, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang no 23 tahun 2002, PDF.  
*Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, (PDF)*, ttp., ttp., tth..  
*Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung:Fokusindo Mandiri, 2013.  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, PDF, ttp., ttp., tth.  
*Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, PDF.  
UU No. 23 tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak (PDF)*, ttp., ttp., tth.  
UU No. 4 tahun 1979 *Tentang Kesejahteraan Anak (PDF)*, ttp., ttp., tth..

### Buku

- AbdHamid, Muhammad Muhyidin, *Sunnan Abu Dawud*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.  
Abdurrahman, Syaikh Jamal, Agus Suwandi (penj.), *Islamic Parenting: Pendidikan Anak Metode Nabi*, Solo:Aqwam, 2010.  
Abdurrahman, Terj. Agus Suwandi, *Islamic Parenting (Athfâlul muslimîn kaifa rabâhumun nabiyyul amin shollallahu ‘alayhi wa sallam)*, Solo; PT Awam Media Profetika, 2012.  
Aburaera, Sukarno, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Arus Timur*: Makassar, 2012.  
Agama. Jakarta: Kencana, 2005Nakhrawie, Asrifin An, *Islam Itu Mudah Harus Dipersulit*, Lamongan:Lumbung Insani, 2013.

- Al – Jauziyah, Ibnu Qayyim, Terj. Ahmad Zainuddin, dan Zaenal Mubarak, *Bekal Menyambut Buah Hati (Tuhfatul Maulud bi Ahkami al-Maulud)*, Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin, Shahih Sunan Abu Daud, bab. Kapan Anak-anak Mulai Diperintahkan Shalat? Dalam kitab Shalat, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al- Jurjawi, Syaikh Ali Ahmad, Nabhani Idris, *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta: Al-Kausar, 2013.
- AL-‘Asqalani, Al Hafizh Ibnu Hajar, Ahmad Najieh (penj.), *Terjemah Bulugul Maram*, Semarang: Pustaka Nuun, 2011.
- Al-‘Asqalani, Al-Haizh Ibnu Hajar, terj. Ahmad Najieh, *Terjemah Bulughul Maram (Bulughul Maram min Adillatil Ahkam)*, Semarang:Pustaka Nuun, 2011
- Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdillah, *Rambu-rambu Syari’at Praktis Fiqih Wanita*, alih bahasa Abu Ahmad Fattah, Solo:As-Salam, 2013
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2008.
- Al-Mundziri, Zaki Al-Din ‘Abd Al- Azhim (penyusun),penerjemah: Syinqithy Dajamaluddin dan H.M. Mochtar Zoerni, *Ringkasan Sahih Muslim*, Bandung: Mizan Media Utama, 2013.
- Anwar, Hanafi, Kisah & Sejarah Dalam Al Qur’an, Jakarta: Al Basith, t.th.
- Aripin, Jaenal, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung. 2008.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, Terj. Mua’ammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 2003.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT. Pusataka Rizzki Putra, 2013.

- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang: 1975
- Basir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Chudlori, Muhammad Yusuf, *Fiqih Interaktif: Mennjawab Berbagai Sosial Umat Islam*, Bandung: Marja, 2013.
- Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Departemen Agama, *Al-Aliyy al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Diponegoro, 2006
- Djalil, A.Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana: Jakarta, 2006.
- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2006
- Eddyono, Supriyadi W., *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Jakarta: ELSAM, 2005, h.2.
- Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta:
- El- Khosht, Mohamed Osman, Abu Ihmadillaha (penj), *Fiqh Wanita: Dari Klasik Sampai Modern*, Solo:PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013.
- Fakhrudin, Arif dan Siti Irhamah (eds.), *Al Hidayah: AL- Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, Banten: PT. Penerbit Kalim di Bawah Kordinator Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al Qur'an (Revisi Terj.) Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur'an, Departemen Agama Republik Indonesia, t.th..
- Fatihahuddin, *Dahsyatnya Silaturahmi*, Jakarta: Delta Prima Press, 2010.
- Fauzi, Achmad, *Kisah Penuh Hikmah Para Sahabat Nabi Muhammad Saw. Dilengkapi Dengan Ayat-ayat Suci Dan Terjemahnya*, t.tp.: MahirSindo Utama, 2011.

- Ghazali, Abd.Rahman.. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkaawinan Indonesia Menurut Perundangan*,  
Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan*, Hukum Adat dan Hukum Agama, Bandung : Mandar Maju, 2007.
- HR., Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Huda, Miftahul dan Muhammad Idris, *Nalar Pendidikan Anak*, Jogjakarta: ArRuzz Media, 2008.
- Huda, Miftahul, *Idealitas Pendidikan Anak*, Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Hukum Adat, Hukum Agama* . Bandung: Mandar Maju, 1990
- Huraerah, Abu, M. Si., *Kekerasan terhadap Anak*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2006.
- Hutagalung, Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata Teknik Menangani Perkara di Pengadilan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011
- Jasmi, Kamarul Azmi, *Pendidikan Islam: Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran*, Johor Darul Ta'zim Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2007
- Jawaz, Muhammad Mughniyah., *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2008.
- Joni, Muhammad Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*
- Joni, Muhammad, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, Jakarta: KPAI, t.t.
- Juwariyah, *Hadist Tarbawi*, Yogyakarta: Teras, 2010.
- Kamaluddin, Undang Ahmad, *Filsafat Manusia*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Kencana, 2004
- Khan, Syaikh Muhmmad Siddiq, Abu Zidna dan Ibnu Syarqi (Penj), *Tafsir Ayat-ayat Wanita*, Klaten: Wafa, 2014.

- Kuncuro, NM.Wahyu, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga, Raih Asa Sukses*, Jakarta, tahun 2010.
- Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Tahun 2017.*
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011..
- M. Zein, Satria Effendi ., *Problematika Hukum Keluarga Islam 2010*
- Makarao, Moh. Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta: Jakarta, 2009
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan*
- Maqdisi, Syaikh Abdul Ghani, Muhammad Azhar (Penj.), *Umdatul Ahkam*, Solo: As-Salam Publishing, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno , *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta: Yogyakarta. 2006
- Mitchell, Ann, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang -Undang Perkawinan*, Kencana: Jakarta, 1986.
- Mufidah , Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Press, 2008
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, Shahih Sunan Abu Daud, bab. Kapan Anak-anak Mulai Diperintahkan Shalat? Dalam kitab Shalat, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Munir, Abdullah, *Pendidikan Karakter*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2010Mughniyah, Muhammad Jawad, Masykur, Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff (Penj), Jakarta: Lentera, 2011.
- Mustaqim, Abdul dan Sahiron Syamsudin (eds.), *Studi Al Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir* , Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2002.
- Mz, Labib dan Muflihah, *Fiqih Wanita Muslimah*, Surabaya: CV. Cahaya Agency Surabaya, t.th.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Prints, Darwan, *Hukum Anak Indonesia. Bandung*: PT Citra Aditya Bakti, 1997

- R., Subekti, & Tjitrosudibio, R., *Hukum Perdata dengan tambahan UUPA dan Undang-undang Pokok Perkawinan*, Jakarta:Pradnya Paramita, 2004.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam:Hukum Fiqih Lengkap*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Rasyid , Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005.
- Rochman, Meuthia G., Al., *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*, Jakarta: ELSAM, 1997.
- Sadulloh, Uyoh, dkk, *Pedagogik (Ilmu Mendidik)*, Bandung: CV.Alfabeta, 2010.
- Saleh , Septhiany Meryam , *Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Kencana: Jakarta, 2012.
- Salman, R. Otje, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Cet.1, Alumni: Bandung, 1993.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta:PT.Rajagrafindo,2015
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011.
- Sarwono, Jonathan, *Pintar Menulis Ilmiah*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Sears , William, *Anak Cerdas: Peranan Orang Tua dalam Mewujudkannya*, Jakarta: Emerald Publishing, 2004.
- Sears , William, *Anak Cerdas: Peranan Orang Tua dalam Mewujudkannya*, Jakarta: Emerald Publishing, 2004.
- Setyowati, Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990
- Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, *Rambu-rambu Syari'at Praktis Fiqih Wanita*, alih bahasa Abu Ahmad Fattah , Solo:As-Salam, 2013.
- Shihab, M. Quraish, *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati, 2013
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbāh*, Volume 1, Ciputat:Penerbit Lentera Hati, 2000.

- Sulaikin Lubis, Wismar, Ain Marzuki, Gemala Dewi. 2008. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana: Jakarta.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Supeno, Hadi, *Menyelamatkan Anak*, Jakarta: Graha Putra, 2010.
- Surabaya: Media Centre, 2006 Wadong, Maulana Hassan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo: Jakarta, 2006
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Syafe'i, Rachmat, *Al-Hadis: Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum*, Pustaka Setia: Bandung, 2000.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung.. 2009.
- Thayyib, Lalu Ibrahim M., *Keajaiban Sains Islam*, Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2010.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munaqahat: Kajian Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Triswanto, Sugeng D., *Skripsi & Menghadapi Presentasi Bebas Stres*, Yogyakarta: PT. Suka Buku, 2010.
- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997. tentang *Peradilan Anak dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Surabaya: Media Centre, 2006.
- Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak*, Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2006.
- Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014.
- Yustisia, Pustaka, *Perundangan tentang Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010..

### **Jurnal**

- Fuadi, “Pemenuhan Hak Anak Oleh Pengelola Panti Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan studi kasus Banda Aceh”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pasca Sarjana Syiah Kuala*, No 1 , Agustus, 2013.
- H.M. Suyudi, “*Hermeneutika Al Qur'an (Studi Tentang Pendekatan Hermeneutik Dalam Penafsiran Al Qur'an*”, *Al Tahrir*, Vol. 2 No. 2, Juli – 2002

### **Kamus**

- Kamisa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: CV. Cahaya Agency Surabaya, 2013.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta:PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1989.

### **Internet (Koran Online dan Artikel Online)**

- Andika Mianoki, <http://muslim.or.id/akhlaq-dan-nasehat/pengaruh-teman-bergaul.html>, diunduh 24 Mei 2018, Pukul. 22.27 WIB.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah <https://kalteng.bps.go.id/quickMap.html>), yang diunduh pada tanggal 08 Februari 2018..
- Boris Tampubolon, S.H, diunduh di website <https://konsultanhukum.web.id/alasan-alasan-perceraian-menurut-hukum/>.
- Dra. Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Yogyakarta: Rajawali Press, 2011, h. 43.
- Editor Ade P.Marboen yang di unduh di <https://www.antaranews.com/berita/264927/perceraian-orangtua-bikin-anak-terlantar>, 30 Oktober 2018.
- Garda Law Office, di unduh di website <https://www.advokatperceraian.com/undang-undang-tentang-hak-asuh-anak-jika-bercerai/>, pada tanggal 13 Juli 2018 pukul. 11.54 WIB



- Gayatri Mantra, diunduh <https://studibudaya.wordpress.com/2010/02/05/penelantaran-anak-kejahatan-kemanusiaan/>, pada tanggal 30 Oktober 2018.
- <http://publication.gunadarma.ac.id/bitstream/123456789/1059/1/10504177.pdf>, pada tanggal 13 Juli 2018, Pukul 10.20 WIB.
- <http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175334/PP%20Nomor%2044%20Tahun%202017.pdf>, UU No.44 tahun 2017, tanggal 08 Februsri 2018.
- <http://www.artikelsiana.com/2015/08/pengertian-pendidikan-tujuan-manfaat.html>, tanggal 12 Mei 2018.
- <https://carapedi.com/2013/07/cara-syarat-prosedur-biaya-mengajukan-gugat-cerai/#>, pada tanggal 13 Juli 2018 pukul 11.31 Wib.
- <https://gaya.tempo.co/read/472668/6-dasar-terjadinya-perceraian-menurut-uu-pernikahan>, pada tanggal 20 Maret 2018
- I Dewa Putu, <http://www.pantirapih.or.id/index.php/artikel/kesehatan-ibu-dan-anak/199-pertumbuhan-dan-perkembangan-anak>, diunduh 25 Mei 2018, Pukul 00.03 WIB.
- Lisa Soemarto, MA. Dalam artikelnya yang berjudul “Biaya Pasca Perceraian, Siapa Yang Menanggung?”, yang di terbitkan secara online di website <https://finance.detik.com/perencanaan-keuangan/d-1857627/biaya-anak-pasca-perceraian-siapa-yang-menanggung>, pada tanggal 13 Juli 2018 pada Rosyid Nur Eka Putra, yang di unduh di website <http://rosyidnureka.blogspot.com/2013/09/kumpulan-hadist-mengenai-pendidikan.html>, pada tanggal 13 Juli 2018 pada pukul 10.33 WIB.
- Muhammad Nur Ichwan Muslim, di unduh di <https://www.ponpes-azzikra.org/berita-pendidikan-anak-tanggung-jawab-siapa.html>, 18 September 2018, Pukul 09.40 WIB.Nurpahsari, di unduh di <http://sosiologihukum-untar5.blogspot.co.id/2010/05/empat-teori-penting-dalam-sosiologi.html>, pada tanggal 20 Maret 2018.
- Udi, Koran Tabengan, diunduh di website <https://www.tabengan.com/bacaberita/102/2-608-istri-gugat-cerai-suami/>, tanggal 05 April 2018, pukul 12.15 WIB.
- website <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf>, tanggal 05 April 2018.